

**ANALISIS KEBIJAKAN RETROSPEKTIF
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI SMA NEGERI 1 BADAU
KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN
BARAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Mencapai Derajat
Sarjana Strata 1 (S-1)
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



Disusun Oleh :

NANDA MUETHIA

NIM : 2018020091

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN RETROSPEKTIF
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI SMA NEGERI 1 BADAU
KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN
BARAT**

Oleh :

NANDA MUETHIA

NIM : 2018020091

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022**

**Menyetujui
Dosen Pembimbing,**

**Dr. Hendro Wardhono, M.Si
NIP : 196809101993031001**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN RETROSPEKTIF PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMA NEGERI 1 BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT

Disusun Oleh :
NANDA MUETHIA
NIM : 2018020091

**Telah dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji
Pada Tanggal 15 Februari 2022 dan dinyatakan
Telah memenuhi syarat untuk diterima**

Susunan Dewan Penguji

Penguji I : Dr. Hendro Wardhono, M.Si

Penguji II : Drs. Zainal Fatah, M.Si

Penguji III : Nihayatus Sholichah, S.Sos, M.AP

**Surabaya, 17 Februari 2022
Universitas Dr. Soetomo
Fakultas Ilmu Administrasi
Dekan,**

Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd
NIDN : 0712115201

PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebanar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 17 Februari 2022

Mahasiswa,

Nanda Muethia
NIM : 2018020091

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Dr. Soetomo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tahapan penyusunan Skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Retrospektif Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Penyelesaian karya ilmiah ini juga dibantu oleh beberapa pihak. Karenanya pada kali ini kami patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan persetujuan kepada kami untuk mengikuti program studi Ilmu Administrasi Negara;
2. Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan berbagai fasilitas dalam mengikuti program studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Sri Roekminiati, S. Sos, M.Kp, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan bimbingan teknis dan akademik kepada kami selama mengikuti perkuliahan pada program studi Ilmu Administrasi Negara;
4. Dr. Hendro Wardhono, M.Si, sebagai pembimbing yang dengan sabar membimbing kami, sehingga kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini;
5. Seluruh dosen pengampuh di program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah kanzah keilmuan penulis, khususnya dalam penyusunan karya ilmiah ini;
6. Kepada teman-teman dan rekan yang telah berjuang dan bekerjasama di program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang selalu member support dalam menjalani aktivitas perkuliahan.

Akhirnya semoga, amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini mendapat balasan dari Allah SWT sebagai amal yang baik. Terima Kasih

Surabaya,
Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tahapan penyusunan Skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Retrospektif Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Maksud dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau apakah sudah sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS. Dengan dasar itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah : (i) ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ditinjau dari perspektif analisis kebijakan restropektif, (ii) ingin mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat apakah yang dapat teridentifikasi atas implementasi kebijakan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan merujuk pada analisis kebijakan restropektif yang berorientasi pada masalah, (iii) memberikan rekomendasi kebijakan agar pelaksanaan kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat lebih baik ke depannya.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan : (i) analisis kebijakan yang telah dirumuskan oleh Wiliam Dunn (2000), dan (ii) analisis kebijakan retrospektif oleh William Dunn (2000). Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini fokus penelitiannya adalah : (i) implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat di tinjau dari perspektif analisis kebijakan restropektif, (ii) faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat teridentifikasi atas implementasi kebijakan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan merujuk pada analisis kebijakan restropektif yang berorientasi pada masalah, (iii) merekomendasi kebijakan yang dapat di rumuskan agar pelaksanaan kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat lebih baik kedepannya. Prosedur pengumpulan data menggunakan tiga cara diantaranya (i) wawancara, (ii) observasi dan (iii) dokumentasi. Hasil yang di dapatkan adalah : (i) implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau sudah sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Penggunaan BOS, karena penggunaan dana BOS di alokasikan kepada proses belajar mengajar (ii) mekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi perlunya perubahan kearah digital dalam mekanisme penyaluran dana BOS ke Sekolah melalui Aplikasi Dapodikmen sehingga dapat mempermudah pihak sekolah dalam menyalurkan data yang diperlukan, dan (iii) belum adanya transparansi dari pihak pengelola dana BOS sekolah kepada dewan guru serta orang tua peserta didik.

Terakhir, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah unu, masih ada beberapa kekurangan, karenanya saran-saran dan kritik yang konstruktik sangat penulis harapkan, dengan maksud menjadi bahan perbaikan karya ilmiah ini. Terima Kasih

Penulis,

Nanda Muethia
NIM : 2018020091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kebijakan Publik.....	12
2.3 Analisis Publik.....	13
2.4 Analisis Kebijakan Restrospektif.....	16
2.5 Prosedur Analisis Kebijakan.....	17
2.6 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	22
2.7 Mekanisme Pengelolaan Dana BOS.....	23
2.8 Tujuan Dana BOS.....	24
2.9 Penggunaan Dana BOS.....	25
2.10 Satuan Biaya Bana BOS.....	27
2.11 Waktu Penyaluran Dana BOS.....	27
2.12 Larangan Penggunaan Dana BOS.....	28

2.13 Kerangka Konseptual.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Fokus Penelitian.....	32
3.3 Subyek dan Informan Penelitian.....	33
3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	34
3.5 Lokasi Penelitian.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Profil Sekolah.....	40
4.1.2 Visi dan Misi SMA Negeri 1 Badau.....	41
4.1.3 Tujuan Sekolah.....	41
4.1.4 Sarana dan Prasarana.....	42
4.1.5 Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	44
4.1.6 Struktur Organisasi.....	45
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Implementasi Kebijakan BOS di SMAN 1 Badau.....	48
4.3 Pembahasan.....	64
4.3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat Ditinjau Dari Analisis Kebijakan Retrospektif.....	64
4.3.2 Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Teridentifikasi Atas Implementasi Kebijakan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.....	78
4.3.3 Rekomendasi Kebijakan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.....	81
BAB V PENUTUP.....	88

5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian terdahulu.....	8
Tabel 2.3	Kelima tahap pembuatan kebijakan yang dinilai parallel dengan tahap analisis kebijakan.....	16
Tabel 2.9	Penggunaan Dana BOS SMA.....	26
Tabel 3.3	Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1	Kondisi sarana dan prasaranan di SMA Negeri 1 Badau tahun 2020/2021	43
Tabel 4.1	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	44
Tabel 4.2	Anggaran SMA Negeri 1 Badau pada tahun 2018-2021	49
Tabel 4.2	Penggunaan dana BOS secara keseluruhan.....	52
Tabel 4.2	Penyaluran dan Pencairan dana BOS.....	57
Tabel 4.3	Pemetaan situasi masalah dengan format Analisis Kebijakan Retrospektif.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5	Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah (WilliamDunn, 1999).....	21
Gambar 2.13	Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 3.6	Analisis Data Model Interaktif Milles dan Huberman (1992)...	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Badau Tahun 2020/2021...	45
Gambar 4.2	Mekanisme Pengalokasian Dana BOS.....	55
Gambar 4.3	Fasilitas Kamar Mandi Siswa dan Siswi SMAN 1 Badau.....	67
Gambar 4.3	Perpustakaan SMA Negeri 1 Badau (2018-2021).....	69
Gambar 4.3	Keadaan Perpustakaan SMAN 1 Badau (2022).....	70
Gambar 4.3	Aplikasi Dapodik (2022).....	70

LAMPIRAN

Lampiran 1. Fasilitas SMA Negeri 1 Badau 2020/2021.....	87
Lampiran 2. Data Ketenagaan SMA Negeri 1 Badau 2020/2021.....	88

ABSTRAK

Nanda Muethia, 2018020091, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi – Universitas Dr. Soetomo, Januari 2022

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi bahwa “pemerintah pusat dan daerah menjamin penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya”. Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berdasari Buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasioanal dan nonpersonalia, sehingga penggunaan dana BOS haruslah tepat sasaran dan transparan dalam proses perencanaan pengelolaan dana BOS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan dana BOS yang dilakukan di SMAN 1 Badau kurun waktu 2018-2021 dengan pendekatan retrospektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Hasil penelitian merujuk pada pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau ditinjau dari analisis kebijakan retrospektif yang mana pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau masih kurang efektif. Hal ini dilihat dari pemeliharaan sarana dan prasaranan yang seharusnya didanai oleh BOS belum memenuhi standar layak pakai serta tidak transparan dalam perencanaan pengelolaan dana BOS yang tidak melibatkan dewan guru dan orang tua peserta didik. Ada beberapa faktor penghambatan dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau seperti : (i) dana BOS yang diberikan belum bisa mencukupi semua kebutuhan sekolah, (ii) kurangnya SDM dalam pengelolaan dana BOS, (iii) letak geografis sekolah yang jauh dari perkotaan, dan (iv) penyaluran dana BOS yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Faktor pendukung dalam pengelolaan dana BOS adalah komunikasi yang baik antara pihak pengelolaan BOS di sekolah. Ada beberapa rekomendasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau yaitu lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut.

Kata Kunci : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Analisis Kebijakan Retrospektif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memberikan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di tanah air. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan pendidikan seseorang memiliki kompetensi dan kualitas untuk menjawab tantangan demi tantangan dalam permasalahan kehidupan global. Prof.Dr. Imam Barnadib mengatakan Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Tidak hanya itu, dengan adanya pendidikan dapat menjadikan penerus bangsa seorang yang berwibawa, terpelajar, jujur dan bertanggung jawab. Sehingga menghasilkan banyak penerus bangsa dengan kualitas baik dimasa depan.

Mahalnya pendidikan menjadi salah satu pemicu dalam rendahnya keterlibatan masyarakat karena tidak semua masyarakat mampu membiayai sekolah, terutama masyarakat miskin atau ekonomi rendah, sehingga partisipasi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang baik harus dilakukan dengan memberikan pendanaan pendidikan bagi masyarakat, salah satunya adalah dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS). Program dana BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003

pasal 34 ayat 2 yang berbunyi bahwa “pemerintah pusat dan daerah menjamin penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya”.

Bantuan Operasional Sekolah ini di Komandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana penyaluran Dana BOS wajib berpegangan pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagaimana yang tertera dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 yang mana dilampirkan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui Permendikbut ini akan memperkuat tata kelola keuangan pendidikan ditanah air.

Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berdasari Buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasioanal dan nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tidak langsung berupa jasa telekomunikasi, daya, air, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, pajak, konsumsi, asuransi dan lain-lain. Dalam penggunaan Dana BOS tersebut, dana di prioritaskan kepada kebutuhan oprasioanal dan nonpersonalia, tidak untuk investasi atau kesejahteraan guru.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimulai sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sekarang tahun 2021. Pada tahun 2009, pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perubahan tersebut untuk kedepan bukan hanya berperan mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun harus berkontribusi besar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Maka dengan adanya program dana BOS ini, sekolah dituntut mampu untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan administrasi biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat.

Dana penyelenggaraan pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihak sekolah diharuskan dapat mengelola dana yang telah disalurkan oleh pemerintah guna menunjang kegiatan belajar siswa. Disisi lain penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai pemenuhan kebutuhan sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang tentunya keterlaksanaan program sekolah harus memberikan output peserta didik yang berkualitas serta memiliki prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Oleh karena itu banyak faktor pendukung di dalam lingkup internal sekolah yang menentukan keberhasilan program BOS. Baik dari faktor pendukung kegiatan belajar mengajar, sarana

dan prasarana, kualitas tenaga pendidik hingga keseluruhan fasilitas pendukung sekolah.

Semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat memahami ketentuan-ketentuan teknis yang harus diperhatikan dan dijalankan dalam rangka penyelenggaraan program BOS. Kesalahpahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan sehingga tujuan tidak tercapai. Besaran dana BOS yang diterima setiap sekolah berbeda-beda tergantung kebutuhan sekolah yang dinilai *urgent* oleh pemerintah. Perbedaan ini bertujuan agar dana dapat digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Implementasi penggunaan dana ini secara umum mencakup seluruh aspek yang diperlukan. Aspek yang dimaksud ialah penyelenggaraan pendidikan disekolah hingga keperluan pribadi persta didik dalam menunjang kelancarannya mengikuti proses belajar mengajar disekolah.

Namun terdapat juga masalah yang kerap terjadi terkait dengan dana BOS yang disalurkan pemerintah ialah mekanisme penyaluran dana yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah tidak sesuai jadwal kebutuhan sekolah. Sehingga minimnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap program Bantuan Operasional Sekolah ini menyulitkan pihak sekolah dalam mengatur keuangan BOS.

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sangat penting dikaitkan dengan peningkatan kualitas sekolah terutama di bidang proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, manajemen sekolah serta kepemimpinan kepala sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan. Selain itu, minimnya fasilitas serta kurangnya perhatian sekolah terhadap kebutuhan siswa dan kurangnya transparansi dari komite sekolah yang tidak melibatkan orang tua peserta didik dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu pemicu terhambatnya pembangunan dan perkembangan pendidikan di sekolah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **"Analisis Kebijakan Restropektif Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ditinjau dari perspektif analisis kebijakan restropektif?

- 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat apakah yang dapat teridentifikasi atas implementasi kebijakan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan merujuk pada analisis kebijakan restropektif yang berorientasi pada masalah?
- 3) Berdasarkan pertanyaan nomor 1 dan 2, rekomendasi kebijakan seperti apakah yang dapat dirumuskan agar pelaksanaan kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat lebih baik ke depan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis teliti berdasarkan rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut :

- 1) Ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ditinjau dari perspektif analisis kebijakan restropektif.
- 2) Ingin mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat apakah yang dapat teridentifikasi atas implementasi kebijakan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan merujuk pada analisis kebijakan restropektif yang berorientasi pada masalah.

- 3) Memberikan rekomendasi kebijakan agar pelaksanaan kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat lebih baik ke depannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

- 1) Manfaat Secara Teoritik

- Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran, pengetahuan, dan referensi.

- 2) Manfaat Secara Praktis

- Bagi Kepala Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana BOS, dan menjadikan penelitian ini sebagai gambaran pertimbangan untuk melihat program sekolah yang kurang relevan.
- Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan dan menambah pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah serta dapat dipergunakan sebagai persyaratan menjadi sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan hasil yang digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian terutama hal yang berkaitan dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya serta sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk meneliti selanjutnya.

Beberapa penelitian yang dianggap relevan sebagai referensi membentuk dasar pijakan penelitian antara lain :

Table 2.1.

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Alisar Lubis	Analisis Pengelolaan Dana BOS di MA Darul Hadits Hutabaringin Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal ;	Relevansi Pengelolaan Dana BOS terhadap proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren	Menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi	Relevansi pengelolaan dana BOS di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist telah relevan dengan proses belajar mengajar, karena setiap dana BOS yang disalurkan di Madrasah	Perbedaan Penelitian yang disusun oleh Muhammad Alisar Lubis ialah pada Fokus Masalah. Penelitian ini

		(2017)	Darul Hadist	model yang dikembangkan sangat beragam.	tersebut, baik berupa sarana maupun prasarana dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan proses belajar mengajar. Dengan hasil tersebut, dana BOS telah membuka kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membuka kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya yang murah dan dengan nominal yang sangat terjangkau bagi peserta didik.	memiliki fokus masalah yaitu Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Hasil penelitian menyatakan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau cukup baik karena dana BOS dialokasikan kepada proses belajar mengajar sesuai dengan pedoman Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS. Walaupun belum relevan namun pihak sekolah masih berusaha mengelola dana BOS sehingga sesuai dengan tujuannya.
2.	Aziz Nurul Fajrin	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Mts Negeri 1 Rangkit Kabupaten Banjarnegara; (2018)	Analisis penggunaan Dana BOS di Mts Negeri 1 Rangkit Kabupaten Banjarnegara	Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menjelaskan, meringkas, kondisi dan	Kegunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Negeri 1 Rangkit Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik, dibuktikan dengan perencanaan yang terorganisir, penggunaan dana BOS yang relevan, dapat	Pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sudah berjalan cukup baik, namun

				variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.	memenuhi komponen pembiayaan BOS dan kegiatan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen sekolah. Kegunaan dana BOS digunakan untuk berbagai kegiatann sekolah, relevansi kegunaan dananya mendukung berbagai kegiatan sekolah. Sekolah juga diharapkan dapat memanfaatkan kegunaan dana BOS secara maksimal sehingga sekolah dapat terus berkembang dan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan menciptakan siswa yang cerdas, berdaya saing dan berprestasi.	ada beberapa kendala dalam penyusunan perencanaan pengelolaan dana BOS yang mana belum adanya transparansi kepada <i>stokeholders</i> sekolah sehingga perencanaan BOS dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan Komite serta Dewan Guru.
3.	Nafisatil Maknun	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS (studi kasus di SD Negeri Tambakan Bangil); (2019)	Pengelolaan dana BOS, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Tambakan Bangil Tahun 2018	Menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah situasi, lapangan atau wilayah tertentu.	Pengelolaan dana BOS di SDN Tambakan Bangil sudah berjalan cukup baik. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN Tambakan Bangil juga sudah berjalan dengan baik. Keduanya dibuktikan dengan perencanaan penyusunan RKAS yang disusun oleh Tim manajemen BOS yang disahkan kepala sekolah dan komite sekolah serta disosialisasikan kepada wali murid.	Pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang tidak mengikuti aturan Buku Petunjuk teknis Penggunaan Dana BOS, salah satunya adalah pihak pengelolaan dana BOS sekolah tidak melibatkan Dewan Guru dan Orang tua

						peserta didik dalam perencanaan pengelolaan dana BOS sehingga ketidak adanya transparansi membuat keraguan bahwa dana BOS tersebut belum tepat sasaran.
--	--	--	--	--	--	---

(Sumber : Diolah Peneliti, 2021)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Muethia yang meneliti tentang Analisis Kebijakan Restropektif Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Namun demikian terdapat persamaan yaitu tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah tahun penelitian, tempat dan judul penelitian yang berbeda.

2.2. Kebijakan Publik

Kabijakan publik memiliki hubungan keterkaitan yang erat dengan berbagai hal di kehidupan masyarakat yang suatu ketika dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika yang ada. Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yaitu sudut pandang (*point of view*), serangkaian tindakan (*series of actions*) dan peraturan (*regulations*). Ketiga hal

tersebutlah yang menjadi pedoman bagi para pengambil kebijakan dalam menjalankan tugasnya.

Sebagian para ahlim memberkan pendapat yang berbeda mengenai kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menurut Dye dalam Eddi (2004:45), menyebutkan kebijakan publik adalah segala yang dilakukan pemerintah, sebab-sebab mengapa hal tersebut dilakukan serta perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibatnya.
- 2) Menurut Lasswell dalam Eddi (2004:45), mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai dan praktik.
- 3) Menurut Lester dalam Eddi (2004:45-46), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah proses atau serangkaian keputusan atau aktifitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah ini riil atautkah masih direncanakan (*umagined*).

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan publik merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara yang ditujukan untuk mengatasi segala persoalan ataupun masalah yang ada ditengah masyarakat, baik yang sudah dijalankan atau diterapkan maupun yang masih direncanakan. Pada dasarnya kebijakan publik yang dibuat dan dirancang pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap pembuatan kebijakan, pemerintah harus mengacu kepada masyarakat karena objek dari suatu kebijakan publik adalah untuk kepentingan masyarakat.

2.3. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya (William N. Dunn, 2000).

Berdasarkan definisi diatas, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan pemaduan berbagai informasi termasuk hasil penelitian, sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras. Kegiatan utama analisis kebijakan adalah pengeumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan yang logis dari informasi tersebut. Salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan adalah hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengelolaan lebih lanjut dari hasil penelitian yang didapatkan sehingga siap digunakan dalam pengambilan keputusan dari kebijakan publik. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan berhati-hati yang melibatkan penelitian terhadap isu-isu atau masalah publik.

Dalam metode analisis versi Dunn terdapat lima prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan adalah sebagai berikut :

- 1) Definisi ialah menghasilkan informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
- 2) Prediksi ialah menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa yang akan datang dari penerapan alternatif kebijakan.
- 3) Preskripsi ialah menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi kebijakan dimasa yang akan datang.
- 4) Deskripsi ialah menghasilkan informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan.
- 5) Evaluasi ialah kegunaan alternatif dalam memecahkan masalah.

Adapun beberapa tahapan dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn, yaitu :

- 1) Fase Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*), disini para pejabat yang di tunjuk dan diangkat menempatkan masalah kebijakan untuk mengatasi masalah.
- 2) Fase Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*), disini para petinggi merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

- 3) Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*), alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.
- 4) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), kebijakan yang telah diambil lalu dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimiliki, terutama finansial dan manusia.
- 5) Penilaian Kebijakan (*Policy Assesment*), unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam tahapan-tahapan diatas selalu disertai dengan prosedur analisis kebijakan, yang pertama dimulai dengan perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Prosedur analisis ini digunakan untuk mengubah *scientific information* menjadi *policy information*. Hal tersebut dapat dilihat pada skema berikut :

Tabel 2.3

Kelima tahap *pembuatan kebijakan* yang dinilai paralel dengan tahapan *analisis kebijakan*.

Analisis Kebijakan	Pembuatan Kebijakan
Perumusan Masalah	Penyusunan Agenda
Peramalan	Formulasi Kebijakan
Rekomendasi	Adopsi Kebijakan

Pemantauan	Implementasi Kebijakan
Penilaian	Penilaian Kebijakan

(Sumber : iptekindonesiaef.blogspot.com)

2.4. Analisis Kebijakan Retrospektif

Menuru William N. Dunn (2000) Analisis Kebijakan Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan atau setelah suatu kebijakan diimplementasikan, demikian merupakan hasil dan transformasi sesudah kebijakan diambil disebut juga dengan model evaluatif. Terdapat 3 gaya analisis retrospektif berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh sekelompok analis, yaitu :

- 1) **Analisis yang Berorientasi Disiplin**, lebih berfokus pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan dan menjelaskan sebab akibat dari kebijakan.
- 2) **Analisis yang Berorientasi Masalah**, menitik beratkan pada aspek hubungan sebab akibat dari kebijakan dan bersifat terapan, namun masih bersifat umum.
- 3) **Analisis yang Berorientasi Aplikasi**, menjelaskan hubungan kausalitas dan lebih tajam untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan pelaku kebijakan. Informasi yang dihasilakn dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan khusus, merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif baru dari kebijakan, serta mengarah pada pemecahan masalah yang praktis.

2.5. **Prosedur Analisis Kebijakan**

Adapun beberapa prosedur analisis kebijakan dengan merujuk pada teori William N. Dunn, sebagai berikut :

1) Perumusan Masalah

Perumusan masalah ialah informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik (Dunn, 1999). Langkah awal dalam perumusan masalah ialah mengenai situasi atau mengenai masalah. Dari situasi masalah kemudian dikembangkan dengan proses pencarian masalah yang lebih detil dan akurat yang kemudian membentuk sebuah meta masalah.

Meta masalah adalah masalah diatas masalah atau tumpukan masalah yang belum terstruktur. Meta masalah ini dilakukan identifikasi dan pengklarifikasian masalah sehingga menghasilkan masalah substantif.

2) Peramalan

Para pembuat atau penganalisa kebijakan harus mengetahui bagaimana cara meramalkan suatu kebijakan, tujuan serta manfaat sebuah peramalan kebijakan, oleh karena itu ramalan kebijakan

merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Jika peramalan kebijakan dapat dilakukan dengan baik maka akan diperoleh visi yang sangat baik, sehingga dapat memperluas kapasitas untuk memahami, mengontrol dan membimbing masyarakat sebagai pelaku kebijakan.

Dalam menganalisis kebijakan, untuk memformulasikan sebuah kebijakan baru maka diperlakukan adanya peramalan atau prediksi mengenai kebijakan apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Permalan kebijakan (policy forecasting) merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan (Dunn, 2000:291). Ramalan mempunyai tiga bentuk utama, antara lain:

- Ekstrapolasi
- Teoritik
- Penilaian Pendapat.

3) Rekomendasi

Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok maupun masyarakat. Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan perlu adanya informasi

tentang konsekuensi di masa yang akan datang setelah dilakukan berbagai alternatif tindakan. Prosedur yang paling umum untuk memecahkan masalah ialah deskripsi, prediksi, evaluasi, dan preskripsi. Dapat di bandingkan dan di pertimbangkan waktu digunakannya prosedur tersebut dan jenis pertanyaan yang sesuai seperti empiric, valuatif, dan normatif.

Adapun beberapa kriteria rekomendasi kebijakan, antara lain :

- a) Efektifitas;
- b) Efisiensi;
- c) Kecukupan;
- d) Pemerataan;
- e) Responsifitas; dan
- f) Kelayakan.

4) Pemantauan

Pemantauan merupakan proses analisis publik yang menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Pemantauan menghasilkan pernyataan yang bersifat program diadopsi lalu diimplementasikan sebelum tindakan dilakukan. Informasi yang dihasilkan pemantauan setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu ketundukan, pemeriksaan, akuntasi dan eksplanasi.

Pemantauan dapat dipilah menjadi empat jenis pendekatan, yaitu :

- a) Akuntansi sistem sosial
- b) Eksperimental sosial
- c) Pemeriksaan sosial
- d) Sintesis riset dan praktis.

Pendekatan terhadap pemantauan memerhatikan hasil yang berkaitan dengan kebijakan dan berfokus pada tujuan serta berorientasi pada perubahan.

5) Evaluasi

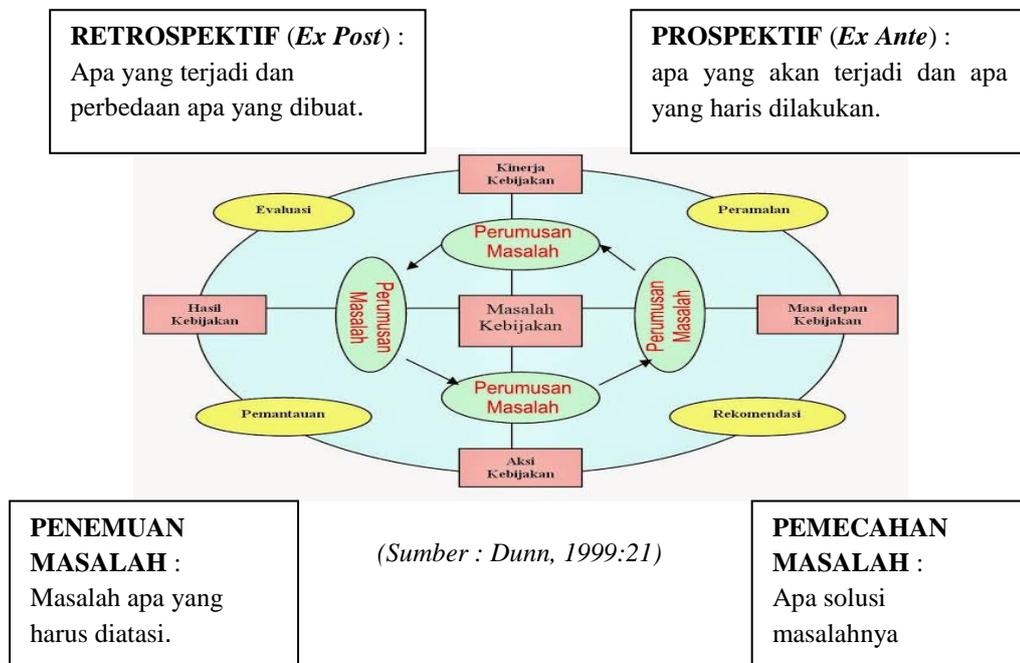
Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses analisis kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, tujuan, nilai dan kesempatan yang dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi juga memberikan sumbangan kalrifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Ada tiga pendekatan utama evaluasi dalam analisis kebijakan, yaitu:

- a) Evaluasi Semu
- b) Evaluasi Formal
- c) Evaluasi Teoritis.

Penggunaan proses analisis kebijakan seperti pernyataan diatas memungkinkan analisis mentransformasikan satu jenis informasi ke informasi lainnya. Oleh karena itu, komponen-komponen informasi kebijakan seperti masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan, ditransformasikan dari satu ke yang lain dengan menggunakan proses analisis kebijakan.

Gambar : 2.5. Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah



2.6. Program Bantuan Operasional Sekolah

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 menyatakan Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan

pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Biaya operasional pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai setiap kebutuhan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional secara teratur dan berkelanjutan. Maka sudah seharusnya pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan dana BOS dilakukan sekolah dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menurut Nanang Fattah dalam Zulfiati (2014), biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan belajar mengajar berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Sedangkan Syaiful Sagala (2016) mengatakan jika pembiayaan pendidikan tidak terpenuhi, paling tidak sesuai dengan kebutuhan minimal, secara nasional akan ditemukan dampak berupa terjadinya erosi kualitas sehingga kontribusinya terhadap pembangunan rendah.

2.7. Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengelolaan dana BOS reguler di sekolah dengan ketentuan sebagai petunjuk teknis Kementerian Agama (Kemenag) 2020, sebagai berikut :

- 1) Dana BOS dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yakni kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
- 2) Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi sekolah.
- 3) Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah yang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler.
- 4) Penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan pelayanan pendidikan di sekolah dan tidak adanya intervensi atau pemotongan dari pihak manapun.
- 5) Penggunaan Dana BOS Reguler harus berdasarkan dengan kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas ditungakan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan pendidikan, khususnya

untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar peserta didik disekolah.

- 6) Pengelolaan Dana BOS Reguler disekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah.

2.8. Tujuan Dana BOS

Program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan ditanah air. Tujuan lain dari program dana BOS ialah :

- a) Membantu biaya operasional non personalia sekolah;
- b) Mengurangi angka putus sekolah;
- c) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
- d) Mewujudkan keberpihakan pemerintah pusat (affimativeaction) bagi peserta didikan yang tidak mampu dengan dibebaskan dari tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
- e) Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan
- f) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui program dana Bantuan Operasional Sekolah dapat menjadikan pendidikan yang berkualitas dan bermutu ditanah air.

2.9. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Peruntukan dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB. Berikut ini peruntukan penggunaan dana BOS untuk SMA, sebagai berikut :

Tabel : 2.9

Penggunaan Dana BOS SMA

No.	Peruntukan Dana	Penjelasan
1.	Pembelian buku teks pelajaran (Buku Paket)	Biaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah buku referensi dan menyediakan buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2.	Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar	Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar
3.	Pembelian peralatan pendukung pendidikan	Meliputi peralatan praktikum seluruh bidang, peralatan kesenian dan olahraga.
4.	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler	Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa seperti pramuka, kegiatan olimpiade, seni dan olahraga.
5.	Pengadaan perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> a) Penambahan buku referensi dan nonteks kedalam perpustakaan. b) mengganti buku yang rusak. c) Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan. d) Pemeliharaan perabotan perpustakaan.
6.	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengadaan brosur, formulir pendaftaran, kertas tes dan naskah soal. b) Membuat spanduk untuk penerimaan peserta didik baru.

		c) Biaya konsumsi d) Honor panitia
7.	Langganan daya	Pembiayaan berupa listrik, air, telepon, internet/wifi.
8.	Pemeliharaan sarana dan prasarana	a) Memperbaiki kebocoran serta pengecatan. b) Pemeliharaan kebersihan kamar mandi/WC. c) Pemeliharaan prabotan, perpustakaan dan ruang kelas. d) Penggunaan dana BOS untuk merekap dan memelihara ruang kelas atau gedung sekolah dan fasilitas lainnya maksimal 15% per tahun dari jumlah dana yang diterima.
9.	Pembayaran honor dan pengembangan profesi guru	a) Pembayaran honor untuk tenaga kependidikan bukan PNS b) Mengadakan pengembangan profesi guru atau peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
10.	Pembelian dan perawatan alat multi media pembelajaran	Berupa pengadaan laptop, printer, proyektor, scanner, dan lainnya.

(Sumber : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS)

2.10. Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS yang diterima oleh SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Menurut peraturan Kemendikbud nomor 8 tahun 2017 tentang satuan biaya BOS, yaitu sebagai berikut :

- 1) SD/SDBL : Rp. 800.000,- /peserta didik/tahun
- 2) SMP/SMPLB : Rp. 1.000.000,- /peserta didik/tahun
- 3) SMA/SMALB/SMK: Rp. 1.400.000,- /Peserta didik/tahun.

2.11. Waktu Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penyaluran dana BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-

Desember. Bagi wilayah yang sulit di jangkau terkendala geografis yang menghambat atau memerlukan biaya perjalanan yang mahal dalam proses pengambilan dana BOS, maka atas susukan pemerintah daerah dan persetujuan Kementrian Pendidikan dan kebudayaan untuk penyaluran dana BOS dilakukan setiap 6 (enam) bulan (persemester), yaitu pada buan Januari-Juni dan Juli-Desember.

2.12. Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

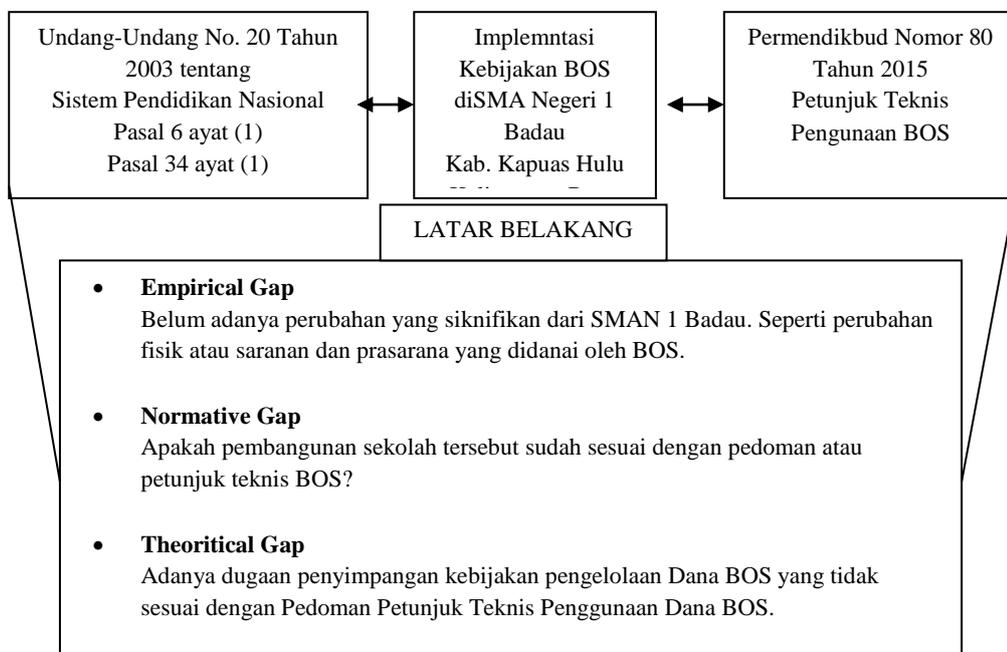
Adapun beberapa larangan dalam penggunaan dana BOS, diantaranya :

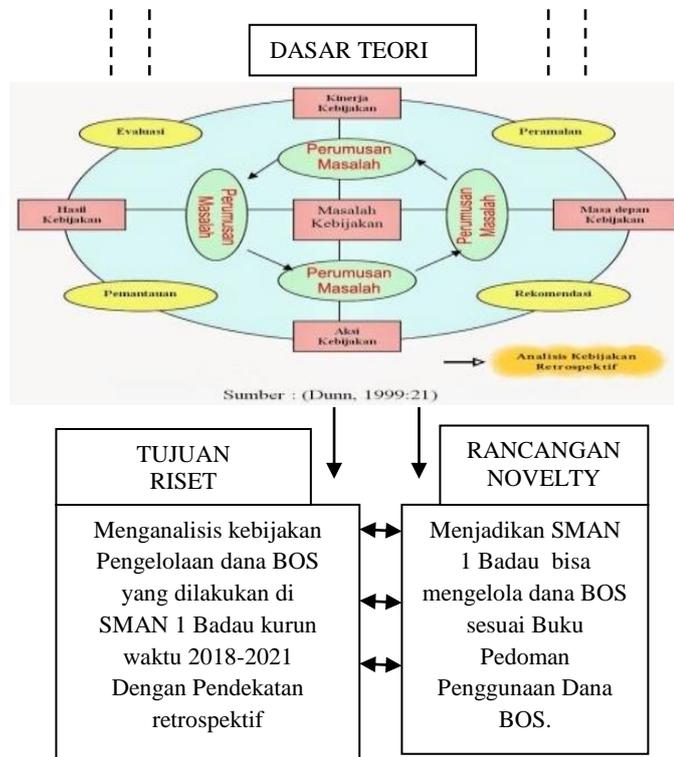
- 1) Disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2) Dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas, seperti studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- 4) Membeli pakaian, seragam atau sepatu peserta didik maupun guru untuk urusan pribadi;
- 5) Digunakan untuk rehabilitas sarana prasarana dengan katagori rusak sedang dan berat;
- 6) Membangun gedung atau ruang baru;
- 7) Membeli saham;
- 8) Membiayai penyelenggara upacara dan keagamaan; dan/atau

- 9) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh pemerintah dan sumber lainnya.

2.13. Kerangka Konseptual

Indonesia adalah salah satu negara yang mementingkan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pendidikan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di tanah air, pemerintah mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan untuk memberikan keringanan untuk masyarakat ekonomi rendah agar dapat merasakan jenjang pendidikan wajib 12 tahun. Pada penelitian kali ini, penulis memfokuskan pada SMA Negeri 1 Badau yang merupakan salah satu instansi pendidikan milik pemerintah yang berada di Kabupaten kapuas hulu, Kalimantan Barat. Kerangka konseptual di gambarkan sebagai berikut :





Gambar : 2.4. Kerangka Konseptual
 Sumber : Diolah Peneliti (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sistematis mengikuti aturan/metode guna menjawab permasalahan yang hendak diteliti.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi (peristiwa) dalam wilayah tertentu. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, gambar dan dokumen dikumpulkan untuk mengkaji masalah bagaimana efektivitas dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, maka haruslah sesuai dengan kondisi sesungguhnya dilapangan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari berbagai sumber (orang-orang) dan perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan melukiskan fenomena atau populasi tertentu yang di peroleh dari subjek yang berupa individu, organisasi atau perspektif lainnya, kemudian menjelaskan aspek yang relevan dengan fenomena yang di amati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada (Moleong, 2006:11).

Untuk memperoleh hasil yang signifikan, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyediaan data dan penarikan kesimpulan.

3.2. Fokus Penelitian

Implementasi kebijakan restropektif menggunakan model William Dunn dimana analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan atau setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Dengan demikian ada tiga fokus penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut :

- 1) Implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat di tinjau dari perspektif analisis kebijakan restropektif dengan memetakan situasi masalah, meta masalah, masalah substantif dan masalah formal.
- 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat teridentifikasi atas implementasi kebijakan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan merujuk pada analisis kebijakan restropektif yang berorientasi pada masalah.
- 3) Merekomendasi kebijakan yang dapat di rumuskan agar pelaksanaan kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat lebih baik kedepannya.

3.3. Subyek dan Informan Penelitian

Dalam Penelitian Kualitatif, digunakan istilah-istilah subyek penelitian atau informan penelitian. Dalam penelitian ini, tahap awal yang dilakukan ialah menentukan informan kunci yaitu Kepala Sekolah. Dari informan diperoleh informasi tambahan lain untuk melengkapi data. Adapun beberapa informan penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel : 3.3

Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Jumlah
Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd	Kepala Sekolah	1
Yohanes Bastian	Bendahara BOS	1
Eddy Lorenzo, ST	Kepala subbagian TU (Kasubbag)	1
Ernawati	Ketua Komite	1
Nasron, S.Th.M.A Ahmat Yani, S.Pd Hendrikus, S.Pd Sri Astuti, S.Pd Nursiah, S.Pd	Wk. Kurikulum Wk. Kesiswaan Guru Ekonomi Guru Bahasa Indonesia Guru Pendidikan Kewarganagaraan (PKN)	5
Dara Juanti Ferdy Hardiansyah Herlina Lestari Helena Stevani	Siswa/Siswi	5

(Sumber : Diolah Penulis, 2021)

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan dimana adanya ketertarikan data satu dengan lainnya sehingga

saling melengkapi. Adapun beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang berupa pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan. Pada saat mengajukan pertanyaan penulis dapat bertanya serta berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak memungkinkan, juga bisa melalui alat komunikasi (Sanusi 2011:105).

Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar kompeten di bidangnya, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara pada Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Tim Manajemen BOS (Komite) dan Bendahara, agar memperoleh data yang lebih lengkap dan juga valid yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen. Wawancara akan dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam untuk mempermudah peneliti mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat lebih mudah untuk memasukannya ke laporan hasil penelitian Analisis Kebijakan Restropektif Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

2) Observasi

Menurut Sanusi (2011:77), Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyektif agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis akan mempersiapkan catatan atau alat observasi terlebih dahulu, baik hanya sekedar menfaptakan daftar cek ataupun sekedar penilaian.

3) Dokumentasi

Menurut Bungin yang dikutip oleh Imam Gunawan mengatakan, teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi sendiri dapat berupa catatan seperti tulisan, gambar, recording atau karya seseorang.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengimplementasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Adapun beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam memperkuat informasi dalam penelitian antara lain dokumen profil sekolah, visi misi sekolah, fasilitas, jumlah guru dan RKAS (Rencana dan Kegiatan Anggaran Sekolah).

3.5. Lokasi Penelitian

Lembaga yang peneliti pilih untuk melakukan penelitian yaitu SMA Negeri 1 Badau yang berlokasi di Jalan Debu No. 50 Kecamatan Badau,

Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. SMA Negeri 1 Badau merupakan salah satu SMA yang ada di kecamatan tersebut dan bersebelahan langsung dengan Negera Malaysia. Peneliti memilih melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Badau karena lokasi yang dekat dengan tempat tinggal peneliti serta peneliti juga merupakan alumni dari SMA tersebut, sehingga peneliti paham betul bagaimana kondisi dari sekolah tersebut.

3.6. Teknik Analisis Data

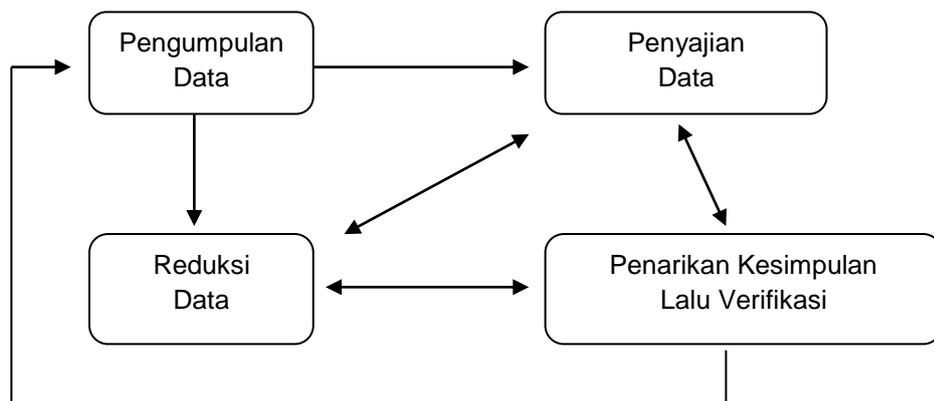
Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan yang di dapatkan di lapangan sehingga lebih mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, analisis data disederhanakan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara maupun dokumentasi yang bersumber dari buku, literature, dan foto.
- 2) Mengklarifikasikan data yang masuk, kemudian di sesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
- 3) Melakukan interpretatif terhadap faktor yang mempengaruhi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif mulai bisa dilakukan pada saat proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman, yaitu analisis

data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas dan dideskripsikan.

Dalam Penelitian ini, teknik analisis data yang penulis pilih ialah analisis data model Milles dan Huberman, yang mana meliputi : (1) Pengumpulan Data (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) mengambil kesimpulan lalu verifikasi. Analisis Data Model Interaktif Milles dan Huberman digambarkan sebagai berikut :



Gambar : 3.6. Analisis Data Model Interatif Milles dan Huberman (1992)

Sumber : A. Michael Huberman, dan Matthew B. Milles. Analisis Data Kualitatif

1) Pengumpulan Data

Peneliti membuat catatan data dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian.

2) Reduksi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari dan dipahami maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data. Pada langkah ini, proses berkaitan erat dengan penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan.

3) Penyajian Data

Penyajian data atau kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Penyajian data yang mudah dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan pada penelitian.

4) Penarikan Kesimpulan Lalu Verifikasi

Analisis ini menggunakan analisis model interaktif yang artinya analisis dilakukan dalam bentuk interaktif dari tiga komponen utama tersebut. Data yang dikumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian direduksi untuk dipilih mana yang palingan tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan terfokus pada data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

SMA Negeri 1 Badau adalah SMA satu-satunya yang ada di Kecamatan Badau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. SMA Negeri 1 Badau berada di jalan Debu No. 50 Kecamatan Badau. Badau merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data statistik tahun 2006, Kecamatan Badau memiliki luas wilayah 700.00 km² dengan ketinggian 33 m dari permukaan laut. Di Kecamatan Badau terdapat 9 kampung setingkat desa dan 20 kampung setingkat dusun, yang secara keseluruhan memiliki penduduk sebanyak 7174 orang.

4.1.1 Profil Sekolah

Nama Sekolah	: SMA Negeri 1 Badau
Alamat	: Jalan Debu No. 50 Kecamatan Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Kode Pos	: 78767
NSS/NPSN	: 301130514001/30102988
Tahun Pendirian	: 1985
Status Sekolah	: Negeri
Naungan	: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
No. Sk. Operasional	: 139 Tahun 2003
Tanggal SK. Operasional	: 23 September 2003
Akreditasi Sekolah	: B
No. SK. Akreditasi	: 748/BAN-SM/SK/2019

Tanggal SK. Akreditasi : 09 September 2019
Nama Kepala Sekolah : Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd
NIP : 197511192005021001
Pengangkatan Kepsek : 01 Oktober 2016
Website : sman1badau.sch.id
E-mail : smansatu.badau@yahoo.co.id

4.1.2 Visi dan Misi SMA Negeri 1 Badau

SMA Negeri 1 Badau memiliki Visi “Terciptanya Situasi dan Kondisi Belajar yang Penuh Makna, Bermoral, Beriman, dan Bertaqwa”.

Adaun Misi dari SMA Negeri 1 Badau, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menerapkan Tata Tertib Sekolah Yang Diciptakan Melalui Musyawarah Seluruh Warga Belajar.
- 2) Mendorong dan Memotivasi Siswa Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar.
- 3) Meningkatkan Potensi Siswa Untuk Mencapai Prestasinya, Baik Dalam Bidang Akademik Maupun Dalam Bidang Non Akademik.

4.1.3 Tujuan Sekolah

Adapun tujuan satuan pendidikan SMA Negeri 1 Badau, diantaranya :

- 1) Menciptakan situasi dan kondisi belajar mengajar secara kondusif sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara warga negara.
- 2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa untuk berkompetisi baik dibidang akademik maupun dibidang non akademik.
- 3) Memfasilitasi apa yang diperlukan oleh siswa dalam mengembangkan potensi diri.
- 4) Pembinaan administrasi sekolah secara sistematis dan berkala.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan personalia sekolah.
- 6) Memanfaatkan secara optimal, penggunaan sarana dan prasarana sekolah.
- 7) Dapat menjadi sumber informasi khusus dalam bidang pendidikan baik bagi warga sekolah maupun warga masyarakat sekitar.

4.1.4 Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Badau

Berikut merupakan data sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Badau pada tahun 2020/2021, yaitu :

Tabel 4.1

Kondisi Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 1 Badau

Tahun 2020/2021

No	Jenis Fasilitas	Baik		Rusak		Ket.
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	
1	Ruang Kelas	5	9x8	4	9x8	
2	Ruang Guru	2	9x8			
3	Ruang TU	1	9x8			
4	R. Kepala Sekolah	1	3x8			
5	R. Laboratorium IPA	1	15x8			
6	R. Perpustakaan			1	12x7	
7	R. Lab. Komputer	1	8x7			
8	Rumah Kepsek	1	7x12			
9	R. Dinas Guru	2	7x12			
10	Mess/Asrama Siswa			1	30x8	
11	Komputer/PC	20				
12	Laptop	10		10		
13	LCD/Infocus	10		1		
14	Meja Guru/TU	12		5		
15	Kursi Guru/TU	17				
16	Meja Siswa	250		50		
17	Kursi Siswa	250		50		
18	WC Guru	4	3x5			
19	WC Siswa			4	6x12	

(Sumber : T.U SMAN 1 Badau, 2021)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki SMA Negeri 1 Badau tidak semuanya dalam kondisi baik. Hal tersebut dapat mempengaruhi proses belajar mengajar serta kenyamanan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Perpustakaan merupakan tempat yang paling berpengaruh di sekolah dimana siswa dapat membaca lebih banyak buku dan menemukan inspirasi baru namun dengan rusaknya

sarana dan prasarana Perpustakaan dapat mempengaruhi efektivitas belajar siswa, selain itu ketidaknyamanan pada kamar mandi siswa yang dimiliki SMA tersebut juga menjadi pemicu kurang nyamannya kegiatan belajar mengajar disekolah.

4.1.5 Pendidik Dan Kependidikan Jumlah Tenaga

Berikut merupakan Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMA Negeri 1 Badau Tahun 2020/2021, yaitu :

Tabel 4.1
Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan

No	Pengelola	PNS		Non PNS		Jumlah
	Tenaga Pendidik	P	L	P	L	
1	Guru Tetap	3	5			8
2	Guru Kontrak				1	1
3	Guru Tidak Tetap			3	3	6
4	Tenaga Administrasi Tetap (T.U)		2			2
5	Pegawai Tidak Tetap (PTT)				2	2
Jumlah						19

(Sumber : T.U SMAN 1 Badau, 2021)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa SMA Negeri 1 Badau memiliki guru tetap sebanyak delapan orang, guru kontrak sebanyak satu orang, guru tidak tetap sebanyak enam orang, tenaga administrasi tetap (T.U) banyak dua orang dan pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak dua orang. Jumlah dari semua tenaga didik dan pendidik ialah sembilan belas orang. Jumlah tersebut terbilang masih kurang, hal ini jelas juga di akui oleh Kepala Sekolah dikarenakan ada beberapa tenaga pengajar yang

Gambar : 4.1 Struktur Oraganisasi SMA Negeri 1 Badau Tahun 2021/2022

Sumber : T.U SMA Negeri 1 Badau, 2021

SMA Negeri 1 Badau di kepalai oleh Kepala Sekolah yang mana Kepala Sekolah membawahi beberapa bagian seperti Oprator Dapodik, Bendahara BOS, Bendahara PBP, Kasubbag Tata Usaha, Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, Pengurus Barang serta para Dewan Guru yang berperan sebagai Wali Kelas. Lalu ada Komite yang di ketuai oleh salah satu orang tua peserta didik dan Kasubbag Tata Usaha yang membawahi dua Staf Tata Usaha. Diakhir terdapat Penjaga Sekolah yang bertugas menjaga keamanan Sekolah dan Siswa yang sedang menjalankan aktifitas di SMA Negeri 1 Badau.

4.2. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan mendeskripsikan tentang hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen, yang mana proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terpilih seperti kepala sekolah, Bendahara BOS, Kepala Tata

Usaha, Komite Sekolah, guru serta beberapa siswa, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Dokumen yang digunakan pada analisis ini ialah laporan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dan Anggaran Pendapatan Sekolah dari tahun 2018-2021, tidak banyak dokumen yang bisa penulis tampilkan dikarenakan pihak sekolah tidak memberikan dokumen lain, dari hasil wawancara dengan Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah menegaskan (01 Desember 2021) :

“Untuk dokumen lain seperti RKAS atau Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS itu perlu izin dari dinas, jadi dari pihak kami tidak bisa memberikan dokumen itu dengan sembarangan”

Pendapat lain ditegaskan oleh Bapak Yohanes Bastian selaku Bandara BOS (01 Desember 2021) :

“Dokumennya ada di Kepala Sekolah, namun untuk diatas tahun 2019 sepertinya ada di laptop pak Wawan (Guru Pindah)”

Analisis dilakukan di SMA Negeri 1 Badau yang menerima dana BOS dengan menghubungkan teori yang digunakan dalam implentasi kebijakan BOS. Berbagai keterangan yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan informan terkait dan dokumen, dapat memberikan gambaran tentang pengimplementasian kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau. Berikut akan dibahas mengenai Implemntasi Kebijakan BOS, Penggunaan dana BOS,

Mekanisme Penyaluran dana BOS, Keterlibatan Stakeholder sekolah dalam perencanaan dan Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau.

4.2.1 Implementasi Kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau

Tahap Implementasi merupakan sebuah proses penting yang paling menentukan apakah Bantuan Operasional Sekolah tepat sasaran atau tidaknya. Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah menyatakan (06 Desember 2021) :

“Tidak ada kebijakan khusus untuk Dana BOS, dari dulu sampai sekarangpun demikian. Kami pihak sekolah harus menggunakan anggaran tersebut dengan petunjuk teknis penggunaan BOS”

Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa Implementasi Kebijakan BOS dari tahun 2018-2021 berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan BOS. Berikut merupakan jalannya implementasi kebijakan pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Badau yang berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan BOS.

1) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengalokasian dan BOS yang diterima oleh pihak sekolah menurut Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Badau merujuk pada Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan BOS yang diberikan oleh Pemerintah. Pemberian dana BOS yang diterima oleh

sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Besar nominal yang setiap tahunnya didapatkan para siswa ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Anggaran SMA Negeri 1 Badau pada tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Siswa	Dana BOS	Total
2018	230	Rp 1.400.000	Rp 322.000.000
2019	235	Rp 1.500.000	Rp 352.500.000
2020	252	Rp 1.500.000	Rp 378.000.000
2021	255	Rp 1.600.000	Rp 408.000.000

(Sumber : T.U SMAN 1 Badau, 2021)

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa besaran nominal yang diterima siswa pada tahun 2018 sebesar Rp 322.000.000. Pada tahun 2019 besaran nominal mengalami peningkatan baik dana yang di salurkan pemerintah maupun jumlah siswa sehingga yang diterima sebesar Rp 352.500.000. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah siswa namun dana yang disalurkan pemerintah tetap sama dengan tahun 2019 yang mana dana yang didapatkan sebesar Rp 378.000.000 dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan dalam jumlah siswa maupun dana yang di salurkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 408.000.000. Penyaluran dana BOS yang berasal dari pemeintah setiap tahunnya mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 tidak terjadi meningkatan diakibatkan oleh Pandemi Covid 19.

Meskipun dana BOS yang diberikan telah di tetapkan jumlah dan mekanismenya, namun terkadang masih terjadinya keterlambatan dana yang menyebabkan sekolah mengalami kesulitan dalam mengelola bantuan tersebut. Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah menegaskan (06 Desember 2021) :

“Dana BOS disalurkan oleh pihak provinsi itu pada bila sudah beres untuk semua sekolah, jadi bukan kesiapan masing-masing sekolah karena merupakan dana Pemerintah jadi harus disalurkan sekaligus kepada setiap sekolah yang ada di wilayah tertentu”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah ialah mekanisme penyaluran dana yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Sehingga ketidaktepatan waktu dalam penyaluran dana BOS oleh pemerintah terhadap program Bantuan Operasional Sekolah ini menyulitkan pihak sekolah dalam mengatur keuangan BOS.

Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional non personalia tentunya yang berkaitan dengan kebutuhan siswa serta pengembangan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Berikut pernyataan dari Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah (06 Desember 2021) :

“Dana BOS untuk membiayai kebutuhan operasional seperti proses belajar mengajar dan perlengkapan penunjang proses belajar mengajar. Dana BOS bukan untuk membiayai tenaga Honor”

Adapun beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah sebelum menggunakan dana BOS untuk membiayai pos-pos yang tertera dalam Juknis, hal ini ditegaskan oleh Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah (06 Desember 2021) :

“Tahap pertama sebelum menggunakan dana BOS yaitu membuat Rencana Kerja yang disetujui oleh Bendahara serta timnya yang kemudian diusulkan lagi ke pihak pusat. Apabila pihak pusat sudah memberikan persetujuan, berarti dana itu bisa di cairkan”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dana BOS yang diterima oleh sekolah dibuatkan Rencana Kerja yang disetujui Bendahara serta timnya, yang kemudian masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat sehingga dana BOS tidak bisa sembarangan di cairkan. Hal tersebut diharapkan agar dana BOS dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan dan disepakati bersama.

Berikut Merupakan komponen-komponan pengalokasian dana BOS yang ada di SMA Negeri 1 Badau.

Tabel : 4.2

Penggunaan Dana BOS secara keseluruhan

No.	Penggunaan Dana BOS	Ket.
1.	Pengadaan alat tulis sekolah	
2.	Pengadaan buku pelajaran	
3.	Pemeliharaan sarana dan prasarana	
4.	Langganan daya dan jasa	
5.	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	
6.	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa	
7.	Kegiatan penerimaan siswa baru	
8.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	

(Sumber : Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah, 2021)

Table diatas merupakan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah (06 Desember 2021) :

“Setiap tahunnya penggunaan Dana BOS selalu untuk membiayai itu, tidak pernah berubah karena dana BOS ini kan memang di peruntukan untuk membiayai kebutuhan Operasional”

Dari pernyataan diatas, pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau sudah sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, yang mana dana BOS memang di alokasikan untuk kebutuhan Operasional non Personalia sekolah. Walaupun demikian kebutuhan sekolah semakin hari semakin meningkat, hal ini diungkapkan oleh Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah (06 Desember 2021) :

“Untuk pengembangan sekolah dana BOS ini sangat terbatas sekali jadi pihak sekolah menggunakan dana BOS hanya untuk prioritas saja jika mencukupi sekaligus itu tidak mungkin”

Hal ini merupakan salah satu penghambat dalam pengelolaan anggaran dana BOS yang mana sekolah harus memilah-milah program BOS yang harus di prioritaskan.

2) Mekanisme Penyaluran Dana BOS ke Sekolah

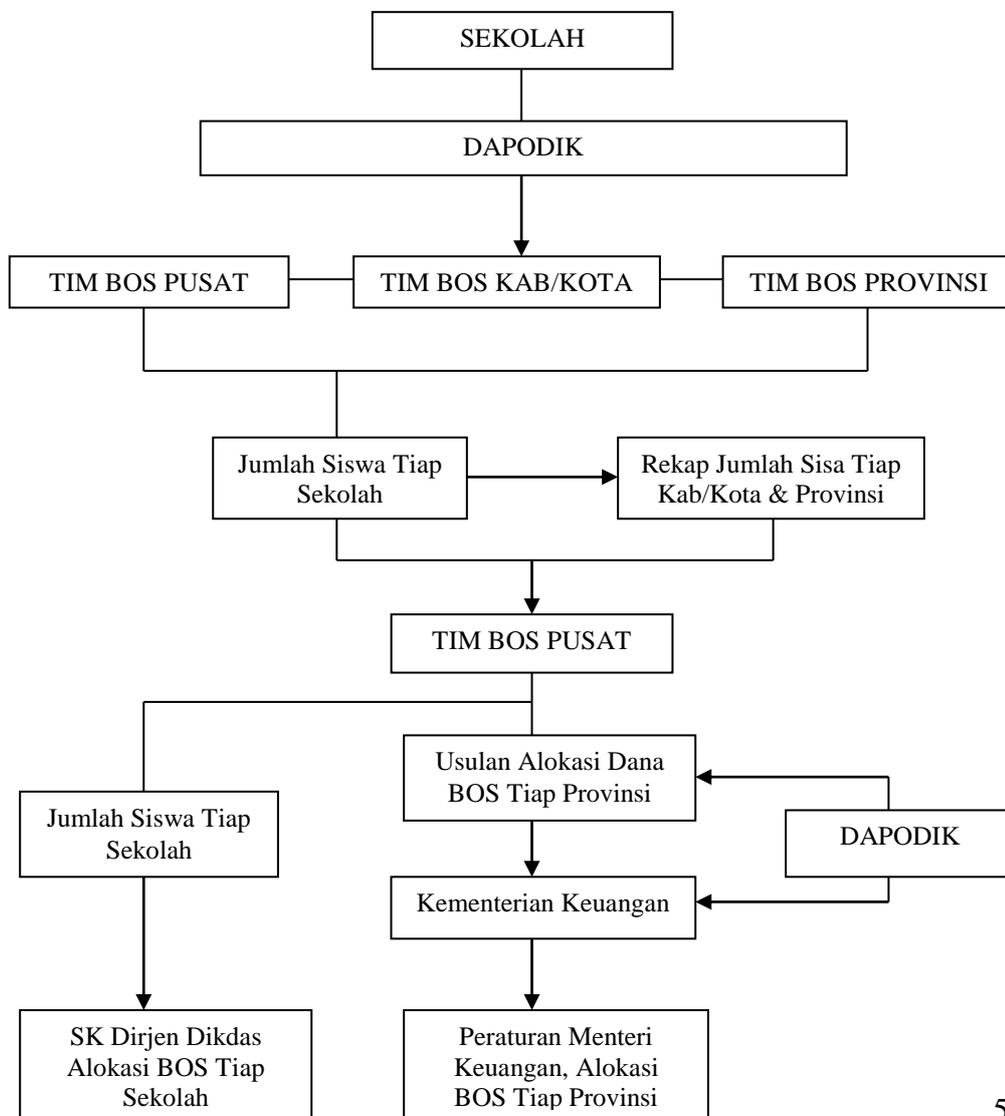
Ada beberapa tahap penyaluran dana BOS agar sampai ke pihak sekolah harus melalui berbagai rangkaian yang tertera di Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS. Seperti yang dijelaskan Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah (06 Desember 2021) :

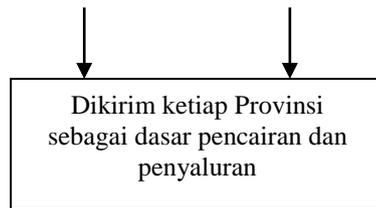
“Pengambilan dana BOS harus melewati rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, setelah ada rekomendasi barulah dana BOS bisa di cairkan. Yang harus mengambil dana BOS tersebut ialah Bendahara beserta Kepala Sekolah tidak bisa diwakilkan”

Jadi tahap pertama dalam pengambilan dana BOS ialah menunggu rekomendasi atau pemanggilan langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi sehingga Bendahara dan Kepala Sekolah bisa langsung pergi ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan membawa beberapa berkas yang menjadi persyaratan pengambilan dana BOS, seperti data seluruh informasi dan jumlah peserta didik. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin tingkat akurasi dan kelengkapan setiap data individu peserta didik, pendidik dan kependidikan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah (06 Desember 2021) :

“Data yang dibawa saat ingin mengambil dana BOS tersebut, seperti Data yang berisi seluruh informasi peserta didik. Hal tersebut menjadi acuan oleh pemerintah dalam menyalurkan dana BOS yang akan diterima pihak sekolah”

Berikut merupakan Mekanisme Pengalokasian Dana BOS menurut Petunjuk Teknik BOS Sekolah Menengah Atas tahun 2015.





Gambar: 4.2 Mekanisme Pengalokasian Dana BOS

Sumber : Petunjuk Teknik BOS Sekolah Menengah Atas tahun 2015, hal. 22

Sekolah harus mengisi data formulir siswa untuk diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota, kemudian Tim Manajemen BOS Kab/Kota melakukan pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan formulir yang diberikan. Tim Manajemen BOS Kab/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data dari formulir jumlah siswa tiap sekolah. Berdasarkan data jumlah siswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap kab/kota/provinsi, selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan. Setelah Kementerian Keuangan menerima data mengenai jumlah siswa dan sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran setiap provinsi sesuai peraturan Kementerian Keuangan. Alokasi dana BOS di tiap provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan jumlah data siswa tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan jumlah siswa tahun ajaran baru.

Penyaluran dana BOS ke sekolah melalui empat tahap dalam satu tahun. Tahap penyaluran dan pencairan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau ialah sebagai berikut :

Tabel : 4.2

Penyaluran dan Pencairan dana BOS

No.	Tri Bulan	Priode
1.	Pertama	Januari – Maret
2.	Kedua	April – Juni
3.	Ketiga	Juli – September
4.	Keempat	Oktober – Desember

(Sumber : Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah, 2021)

Dari Hasil wawancara Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah menegaskan (06 Desember 2021) :

“Penyaluran dana BOS memiliki prosedurnya sendiri. Pencairan dana BOS hanya bisa dilakukan Kepala Sekolah beserta Bendahara BOS dengan menunjukkan Buku Rekening BOS, identitas diri, fotocopy KTP, voucher yang diterima dari Tim BOS Provinsi”

Mekanisme Pengambilan/pencairan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau telah sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang mana pengambilan/pencairan dana BOS harus dilakukan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS disertai buku rekening BOS, identitas diri serta voucher yang diterima dari Tim BOS Provinsi.

3) Keterlibatan *Stakeholders* Sekolah

Peran serta *stakeholders* sangat penting dalam perencanaan, penyusunan dan pelaporan dana BOS. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam setiap detail penggunaan dana BOS. Keterlibatan *stakeholders* ini dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penggunaan dana BOS harus berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah, Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara disertai tanda tangan setiap peserta rapat.

Pada praktiknya, penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau sebelumnya sudah dilakukannya sosialisasi kepada para Dewan Guru. Pihak sekolah mensosialisasikan terkait apa itu BOS, Kegunaan BOS, tujuan BOS, ketentuan yang perlu ditaati dalam penggunaan dana BOS dan sebagainya. Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah menyatakan (06 Desember 2021) :

“Pernah dilakukan Sosialisasi BOS kepada dewan guru tentang kegunaan BOS, Tujuan BOS dan lain sebagainya. Namun sosialisasi kepada orang tua siswa tidak pernah, hanya dengan komite sekolah yang merupakan perwakilan dari orang tua siswa”

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Eddy Lorenzo, ST selaku kepala subbagian TU (Kasubbag), menyatakan (06 Desember 2021) :

“Kegunaan dana BOS itu untuk kebutuhan Operasional siswa dan untuk pembelian fasilitas atau sarana dan prasarana lain yang menunjang proses belajar mengajar siswa. Sosialisasi bersama komite dan dewan guru juga selalu dilakukan mengingat dana BOS itu harus transparan dan akuntebel”

Sosialisasi terkait dana BOS diperlukan untuk memberitahukan mengenai informasi kepada guru dan orang tua siswa agar memiliki mengetahui kegunaan dana BOS. Dengan adanya pemahaman tentang BOS maka bila terjadi kekeliruan dalam pengelolaan dana tersebut, guru dan orang tua siswa dapat membantu dalam mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berikut penuturan Ibu Ernawati selaku Ketua Komite di SMA Negeri 1 Badau (06 Desember 2021) :

“Pernah dilakukan sosialisasi mengenai BOS namun itu sudah lama sekali, untuk rencana penggunaannya saya tidak tau, tidak pernah diberitahukan tentang itu. Pencairan dan besaran dana BOS yang diterima tiap tahunnya saja saya tidak tau”

Dari pernyataan diatas, dana BOS yang dikelola oleh pihak sekolah tidak melibatkan *stakeholders* dalam perencanaan penggunaan anggaran

tersebut. Dalam hal ini, orang tua siswa juga kurang memahami kegunaan dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah, hal ini terjadi karena kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Ernawati selaku Ketua Komite (06 Desember 2021) :

“Kami tidak mengetahui secara pasti rencana penggunaan dana BOS, yang kami tau dana BOS ini dialokasikan untuk proses belajar mengajar siswa”

Namun pendapat berbeda dilontarkan oleh bapak Yohanes Bastian selaku Bendahara BOS (06 Desember 2021) :

“laporan perencanaan penggunaan BOS sebenarnya bisa langsung ditanyakan pada saya. Saya akan langsung memberikan rincian laporan jika ada yang meminta”

Dari pengakuan tersebut dijelaskan bahwa pihak Manajemen BOS akan selalu terbuka mengenai laporan perencanaan penggunaan dana BOS. Jika ada guru atau orang tua siswa ingin mengetahui lebih rinci terkait penggunaan dana BOS maka bisa datang langsung ke Bendahara BOS.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa dewan guru pada tanggal 06 Desember 2021 dan 07 Desember 2021 terkait sosialisasi dan keterlibatan dalam laporan perencanaan dana BOS,yaitu sebagai berikut :

a) Nasron, S.Th.M.A selaku Wk. Kurikulum menyatakan (06 Desember 2021) :

“Dana BOS yang diberikan pemerintah pernah sekali di sosialisasikan tapi setelahnya tidak ada. Kegunaan dana BOS ya untuk membeli buku, menunjang proses belajar mengajar siswa. Untuk sisanya saya tidak tau”.

b) Ahmat Yani, S.Pd selaku Wk. Kesiswaan, menyatakan (06 Desember 2021) :

“Saya tidak tau menau terkait dana BOS. Saya rasa guru lain pun begitu. Pengelolaan dana BOS tidak pernah transparan jadi pihak guru tidak tau menau mengenai dana BOS, besar biaya yang diterima serta penggunaannya”

c) Hendrikus, S.Pd selaku Guru Ekonomi, menyatakan (07 Desember 2021) :

“Seingat saya pernah disosialisasikan, namun soal rapat atau partisipasi dalam laporan perencanaan dana BOS kami tidak pernah, dari dulu hingga sekarang tidak pernah ada rapat yang seperti itu”.

d) Sri Astuti, S.Pd selaku Guru Bahasa Indonesia, menyatakan (06 Desember 2021) :

“Kegunaan dana BOS itu kan untuk proses belajar mengajar siswa ya, sisanya saya tidak tau. Sebelumnya juga tidak diberitahukan jika ingin tau laporan perencanaan BOS itu bisa langsung ke timnya”.

- e) Nursiah, S.Pd selaku guru Pendidikan Kewarganagaraan (PKN), menyatakan (06 Desember 2021) :

“Ibu tidak tau nak, tidak pernah ada rapat juga. Sebelumnya juga tidak ada pemberitahuan dari pihak pengelola BOS bahwa kalau mau mengetahui Penggunaan Dana BOS lebih detailnya ke Pak Bastian (Bendahara BOS). Pihak guru segan untuk bertanya karena sejak awal memang tidak dilibatkan”.

4) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS

Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau diperoleh peneliti melalui wawancara dengan pihak sekolah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah menyatakan (06 Desember 2021) :

“Faktor Penghambat implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS itu kurangnya atau minimnya SDM dalam mengelola dana BOS ini, hanya saya dan bendahara BOS saja yang bersama-sama

mengelola dana BOS. Dan letak lokasi kita yang jauh dari perkotaan ini membuat pencairan dana BOS itu lambat sehingga pencairan dana BOS itu tidak bertepatan dengan waktu dibutuhkan”

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Yohanes Sebastian selaku Bendahara BOS, menyatakan (06 Desember 2021) :

“Beberapa hambatannya ialah Keterlambatan Pencairan dana BOS serta dana BOS yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan sekolah”

Hambatan seperti kurangnya SDM, Keterlambatan Pencairan dana BOS serta minimnya dana BOS yang diterima sekolah menjadikan pihak sekolah kesulitan mengelola dana BOS. Adapun beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS yang di tegaskan oleh Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah (06 Desember 2021) :

“Faktor Pendukung sepertinya Komunikasi. Komunikasi yang baik menciptakan kerjasama yang baik antara Tim BOS sekolah sehingga pengelolaan dana BOS di sini berjalan dengan tepat sasaran”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat faktor pendukung dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS di SMA

Negeri 1 Badau ialah Komunikasi yang mana Komunikasi yang baik menciptakan kerjasama yang baik bupa sehingga pengelolaan dana BOS oleh Tim baik berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

4.3. Pembahasan

Pada bagian ini akan membahas tentang analisis dari hasil penelitian di SMA Negeri 1 Badau ditinjau dari perspektif analisis kebijakan retrospektif, yang mana retrospektif ialah pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi, bertujuan untuk mencari faktor yang berhubungan dengan penyebab masalah pada kebijakan yang diimplementasikan.

4.3.1 Implemntasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat Ditinjau Dari Perspektif Analisis Kebijakan Retrospektif

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah, implementasi kebijakan yang berpedoman pada buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS sebenarnya sudah efektif, namun ada beberapa kendala dalam pengelolaan dana BOS tersebut di antaranya :

1) Penggunaan Dana BOS

Dari hasil wawancara, penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang mana penggunaan dana tersebut di peruntukan bagi kebutuhan Operasional non Personalialia

Sekolah. Peneliti melakukan analisis lebih mendalam terhadap sarana dan prasarana yang didanai oleh BOS, yaitu sebagai berikut :

a. Pengadaan alat tulis sekolah serta sarana dan prasarana lainnya

Alat-alat seperti spidol, penghapus papan tulis, sapu, pel dan tong sampah tidak termasuk dalam sarana dan prasarana yang di danai oleh BOS. Hal ini disampaikan oleh Dara Juanti selaku Siswi di SMA Negeri 1 Badau angkatan tahun 2019/2020 (14 Desember 2021) :

“Untuk kebutuhan sapu, pel, spidol dan lain-lainnya kita beli sendiri menggunakan uang kas yang dikumpulkan setiap siswa dalam satu kelas”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang seharusnya di danai oleh BOS malah dibebankan kepada siswa. Hal ini tidak sejalan dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa dana BOS diperuntukan sebagai pembiayaan kebutuhan Operasional non personalia sekolah.

b. Pengadaan Buku Pelajaran

Dari tahun 2018-2020 buku pelajaran masih belum lengkap, yang mana satu buku harus di bagi dua sampai tiga siswa, hal ini sangat mempengaruhi efektivitas belajar dikarenakan siswa harus berbagi atau bergilir buku pelajaran. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Ferdy Hardiansyah, salah satu siswa SMA Negeri 1 Badau angkatan tahun 2018/2019 (14 Desember 2021) :

“Buku paket dulu sedikit, saya sampai berbagi dengan tiga teman saya. Jadi simpan bukunya giliran gitu. Kesulitan kalau ada PR”

Seperti yang sudah diungkapkan oleh Kepala Sekolah, dana BOS yang di dapatkan oleh sekolah dirasa belum cukup dalam menunjang semua kebutuhan Operasional siswa. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan pendapatan anggaran dana BOS yaitu sebesar Rp 408.000.000 sehingga pada tahun tersebut buku pelajaran mengalami penambahan dan saat ini satu siswa memegang satu buku pelajaran. Hal ini tentu merupakan peningkatan yang sangat baik. Pengelolaan dana BOS yang benar dan efektif dapat meningkatkan minat belajar dan keefektifitas belajar mengajar.

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana ialah agar barang tidak mudah rusak hilang atau kadaluarsa. Di SMA Negeri 1 Badau masih cukup banyak sarana dan prasarana yang kurang perawatan atau kurang dijaga dengan baik, salah satunya ialah kamar mandi siswa, yang mana tidak diperbaikinya kunci pintu

pada kamar mandi, sehingga kamar mandi siswa dan siswi sama-sama tidak memiliki kunci. Seperti yang diungkapkan oleh Herlina Lestari salah satu siswi di SMA Negeri 1 Badau angkatan tahun 2020/2021 (14 Desember 2021) :

“Saya berharap kamar mandi lekas diperbaiki, dari pertama saya masuk disini sampai sekarang kamar mandi tidak pernah diperbaiki, setidaknya dikasi kunci biar lebih aman dan air juga, setiap saya ke kamar mandi pasti tidak pernah ada airnya, itu membuat saya kurang nyaman”

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat pemeliharaan sarana dan prasarana belum berjalan sesuai dengan tujuannya, mengingat masih banyak keluhan dari siswa mengenai sarana dan prasarana yang tidak layak pakai, menurut Nanang Fattah dalam Zulfiati (2014), biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Dalam hal ini sarana dan prasarana sekolah masuk pada biaya langsung yang seharusnya lebih diperhatikan. Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan belajar mengajar berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, gaji guru, dan lain sebagainya. Ketidak tepat sasaran dana BOS sebagai penunjang

proses belajar mengajar di sekolah sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan prestasi peserta didik.



Gambar 4.3 : Fasilitas Kamar Mandi Siswa dan Siswi di SMA Negeri 1 Badau

Sumber : SMA Negeri 1 Badau

Perpustakaan juga merupakan sarana dan prasarana yang harus menjadi perhatian pemeliharaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau. sejak tahun 2018-2021 Perpustakaan tidak di kelola dengan baik, buku yang sedikit dan ada yang sudah tidak layak baca serta penjaga perpustakaan yang tidak ada menjadikan perpustakaan hal yang tidak menarik dikalangan peserta didik. Hal ini sejalan dengan pengakuan Helena yang merupakan salah satu siswi di SMA Negeri 1 Badau angkatan tahun 2018/2019 (14 Desember 2021) :

“Saya pernah keperpustakaan tapi disana bukunya sedikit, ada yang udah rusak juga, karena jarang digunakan jadi berdebu”

Pendapat sama di kemukakan oleh Stevani selaku siswi di SMA Negeri 1 Badau angkatan tahun 2019/2020 (14 Desember 2021) :

“Perpustakaan disini tidak pernah dibuka, jika mau ke perpustakaan itu harus izin ke guru dulu minta kuncinya. Jadi malas mengunjungi perpustakaan”

Perpustakaan adalah salah satu tempat untuk peserta didik mencari referensi serta mengembangkan minat membaca di sekolah. Namun dengan keadaan perpustakaan yang tidak terawat dapat menjadi penghambat perkembangan peserta didik dalam proses belajar sehingga sekolah harus lebih memperhatikan kebutuhan siswa. Hal ini tidak sejalan dengan hasil wawancara yang mana menyebutkan bahwa dana BOS diperuntukan bagi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.



Gambar 4.3 : Perpustakaan SMA Negeri 1 Badau (2018-2021)

Sumber : SMA Negeri 1 Badau

Pada tanggal 20 Desember 2021, penulis berdiskusi dengan Kepala Sekolah mengenai Perpustakaan yang harus segera di jalankan sesuai fungsinya. Mengingat tidak adanya petugas perpustakaan di SMA Negeri 1 Badau, penulis merekomendasikan teman yang juga alumni dari SMA tersebut, karena teman saya cukup berprestasi di sekolah jadi pihak sekolah langsung menyetujuinya. Pada tanggal 3 Desember 2021, penulis bersama dengan teman yang juga merupakan petugas perpustakaan yang baru membersihkan dan merapikan perpustakaan. Saat ini Perpustakaan di SMA Negeri 1 Badau sudah mulai di jalankan dan pihak sekolah mengaku akan memesan buku dan rak baru untuk sarana dan prasarana yang ada Perpustakaan.



Gambar 4.3 : Perpustakaan SMAN 1 Badau (2022)
Sumber : SMA Negeri 1 Badau

2) Mekanisme Penyaluran dana BOS ke Sekolah

Di dunia yang sudah modern ini, semua hal sudah bisa di akses menggunakan internet tak terkecuali dengan mekanisme penyaluran dana BOS ke setiap sekolah. Adanya aplikasi Dapodik mempermudah setiap sekolah dalam memproses penyaluran dana BOS.



Gambar 4.3 : Aplikasi Dapodik (Versi 2022)

Sumber : dapo.kemdikbud.go.id

Nita Oktifa (2021) menyatakan secara umum fungsi Aplikasi Dapodik adalah untuk menjadi acuan data yang digunakan oleh Kemdikbud sebagai pusat data pendidikan nasional. Berikut ini beberapa fungsi Aplikasi Dapodik, yaitu :

- a) Untuk menentukan jumlah alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- b) Untuk menentukan kuota tunjangan bagi guru.
- c) Untuk menentukan alokasi bantuan untuk fasilitas sekolah yang kualitasnya belum baik.
- d) Menjadi acuan pemerataan guru.

- e) Menjadi media untuk verifikasi dan validasi data berkaitan dengan satuan pendidikan serta NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).
- f) Menjadi media memverifikasi dan memvalidasi data untuk mendapatkan NUPTK bagi guru dan NISN bagi siswa.
- g) Sebagai alat untuk monitoring kebijakan yang dilakukan oleh pihak Kemdikbud.
- h) Membantu mengurangi resiko penyimpangan dari pihak sekolah.

Sekolah hanya mengirimkan data informasi seluruh peserta didik ke aplikasi Dapodikmen lalu diverifikasi kembali oleh Tim Manajemen BOS, hal ini untuk memastikan jumlah peserta didik yang tercantum sesuai atau tidaknya dengan jumlah yang ada di sekolah. Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengambilan data pada Dapodik untuk membuat usulan alokasi dana BOS tiap Provinsi yang akan dikirimkan ke Kementerian Keuangan. Penghitungan alokasi dana BOS berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah peserta didik di tiap sekolah yang ada di Dapodikmen, setelah itu barulah Kementerian Keuangan menetapkan besaran alokasi BOS tiap Provinsi.

Untuk sekolah yang belum terdaftar dalam Dapodikmen harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Manajemen BOS Kab/Kota,

Tim Dapodikmen Kab/Kota dan Tim Dapodikmen Pusat. Berikut merupakan alur penggunaan Aplikasi Dapodik, yaitu :

- a) Unduh dan Instal Aplikasi Dapodik
- b) Registrasi, registrasi dapat dilakukan secara online maupun offline. Jika registrasi dilakukan secara offline, lakukan *generate prefill* terlebih dahulu.
- c) Perbarui Data Sekolah, data yang harus di perbarui ialah data periodik terutama yang terkait dengan status penerima dana BOS.
- d) Perbarui Data Peserta Didik, data peserta didik yang perlu di perbarui meliputi : peserta didik baru, peserta didik yang sudah keluar, mencetak surat mutasi peserta didik yang sudah keluar dan mengisi lintang dan bujur zonasi sekolah.
- e) Perbarui Data Guru dan Tenaga Kependidikan, data guru dan tenaga kependidikan diperbarui dengan cara menambah/menarik GTK baru (jika ada), mengeluarkan GTK yang pindah/keluar, mengupload data periodik guru, mengecek penugasan dan tambahan.
- f) Perbarui Data Sarana dan Prasarana, mengisis data periodik sarana dan prasarana, menghapus dan menambahkan sarpras,

melengkapi data data sarpras dan mengecek isian kerusakan sarpras.

- g) Perbarui Data Rombongan Belajar, data rombel meliputi data : data rombel reguler dan ekskul, data rombel khusus untuk lintas minat SMA, rombel praktik untuk jenjang SMK, mengecek kurikulum, memetakan anggota rombel.
- h) Perbarui Data Jadwal, pada bagian ini harus mengisi pembagian jam mengajar dan membuat pemetaan jadwal guru.
- i) Validasi dan Sinkronisasi, pada bagian ini dilakukanya validasi untuk memastikan semua data yang diunggah adalah benar. Setelah itu dilakukan sinkronisasi dengan menggunakan login kepala sekolah setelah mengecek lembar konfirmasi.

Hal ini tentu akan mempermudah mekanisme penyaluran dana BOS kesetiap sekolah sehingga penulis memberikan saran atau rekondasi kepada Kepala Sekolah mengenai aplikasi Dapodik.

- 3) Keterlibatan *Stakeholders* Sekolah dalam Perencanaan, penyusunan dan pelaporan penggunaan Dana BOS

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan akses bagi setiap orang dalam memperoleh informasi. Informasi mengenai perencanaan, penyusunan dan pelaporan dana BOS merupakan informasi penting yang harus di ketahui seluruh *stakeholders* sekolah hal ini juga

termasuk dalam Buku Petunjuk Teknis Penggunaan BOS yang mana Perencanaan Pengelolaan Dana BOS haruslah diskusikan dalam rapat bersama seluruh *stakeholders* sekolah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Subbagian T.U, Komite dan Dewan Guru, menunjukkan pendapat yang berbeda-beda. Yang mana pengakuan dari Kepala Sekolah dan Tim BOS menyatakan bahwa sekolah telah menerapkan transparansi pengelolaan dana kepada para Dewan Guru melalui rapat dan hasil disepakati bersama namun dari pengakuan Dewan Guru, tidak pernah diadakan rapat mengenai laporan perencanaan pengelolaan dana BOS termasuk kepada Komite dan orang tua peserta didik.

Ketidakikutsertaan dewan guru dalam laporan perencanaan BOS menjadikan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau tidak efektif. Jika melihat pada ketentuan penggunaan dana BOS dimana penggunaan dana BOS oleh sekolah harus berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah, Tim BOS, dewan guru dan komite sekolah, nampaknya yang terjadi agak menyimpang dari ketentuan yang ada. Pihak sekolah membuat laporan perencanaan pengelolaan dana BOS tanpa melibatkan dewan guru dan komite sekolah, seperti yang kita tau komite sangat dibutuhkan dalam proses tersebut untuk memberikan masukan-masukan

yang bermanfaat serta sebagai pengawas internal dalam pengelolaan dana BOS.

Meskipun pelaporan penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah sebagai pihak yang menerima dan mencairkan dana BOS namun untuk memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dan pengelolaan dana BOS tersebut pihak sekolah seharusnya turut melibatkan *stakeholders* dalam kegiatannya.

Menurut Stevan Selfanus A. Menyatakan ada lima faktor yang menyebabkan pemerintah yang tidak transparan, yaitu sebagai berikut :

- a) Pengaruh Kekuasaan, kekuasaan yang dimiliki segelintir orang akan membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal atau kepentingan yang diinginkan.
- b) Konflik Sosial Budaya, konflik ini dapat terjadi karena keragaman suku, budaya, dan agama dalam lingkungan masyarakat. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai permasalahan.
- c) Penyelewengan Hukum, pemerintah tidak transparan karena terjadinya penyelewengan hukum yang artinya hukum disalahgunakan, sehingga tidak adil atau berat sebelah kepihak tertentu.

- d) Etika, dalam kehidupan publik, etika menjadi sumber nilai penting. Apabila etika tidak diterapkan dengan baik, dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan seperti ketidakadilan, penyelenggaraan hukum dan lain-lainnya.
- e) Politik dan Hukum,, sistem politik otoriter akan melahirkan pemimpin yang tidak dapat mendengar aspirasi serta memperjuangkan hak masyarakatnya. Terlebih jika sistem politik ini di dukung dengan penerapan hukum yang semena-mena atau tidak adil.

Di SMA Negeri 1 Badau sendiri, kurangnya transparansi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- 1) Beban Kepala Sekolah, semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin banyak juga beban yang harus dipertanggung jawabkan sehingga menyulitkan Kepala Sekolah melibatkan *Stakeholders* dalam penyusunan perencanaan penggunaan dana BOS.
- 2) Pengelolaan Dana BOS Tidak Dilaksanakan Sesuai Prosedur, hasil wawancara menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS sudah berpedoman pada buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, namun masih banyak terjadi penyimpangan dalam

pengelolaan yang tidak mengikuti buku pedoman Petunjuk Penggunaan Dana BOS.

- 3) Pihak Sekolah Sengaja Tidak Mengunduh Aplikasi Dapodik Sehingga Tidak diawasi Langsung Oleh Pemerintah, Aplikasi Dapodik mulai dikembangkan pada tahun 2006 oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan mulai dioperasikan secara aktif pada tahun 2012. Pada tahun 2018, SMA Negeri 1 Badau direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang artinya aplikasi dapodik sudah bisa dijalankan sejak saat itu. Namun pihak sekolah mengaku tidak mengetahui hal tersebut, padahal aplikasi dapodik sudah banyak tersebar di internet dan bukan hal asing di dunia pendidikan karena aplikasi dapodik ini sangat penting khususnya dalam pengelolaan Dana BOS dan diawasi langsung dari Pemerintah Pusat sehingga meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan.

4.3.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Teridentifikasi Atas Implementasi Kebijakan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat

Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, sebagai berikut :

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan yang utama ialah Komunikasi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang mana dari tahun 2018-2021 penggunaan dana BOS dialokasikan kepada kebutuhan Operasional non personalia sekolah. Komunikasi yang baik terjalin antara Kepala Sekolah dan Bendahara BOS serta Timnya dalam mengelola dana BOS sehingga alokasi penyaluran dana menjadi lebih baik dari tahun ketahun, hal ini dibuktikan dengan buku pelajaran yang diberikan pada peserta didikan mengalami penambahan.

2) Faktor Penghambat

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah ada beberapa faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau, yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya SDM dalam mengelola Dana BOS, dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah pengelolaan dana BOS hanya dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS sehingga sekolah kesulitan dalam mengelola dana BOS tersebut. Seharusnya pihak sekolah melibatkan para guru dalam pengelolaan dana BOS

tersebut, peran serta dewan guru dapat meringankan pengelolaan dana BOS yang selama ini hanya dilakukan berdua. Hal ini juga akan menjadikan proses perencanaan dan pengelolaan dana BOS menjadi lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan pedoman buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS.

- b. Letak Geografis Sekolah, letak sekolah yang berada di perdesaan jauh dari kota menjadi salah satu penghambatnya penyaluran dana BOS. Untuk sampai ke Provinsi, Kepala Sekolah dan Bendahara BOS memakan waktu 8 jam selama perjalanan. Pentingnya penggunaan aplikasi Dapodikmen menjadikan penyaluran dana BOS lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama sehingga penyaluran dana BOS ke pihak sekolah bisa dilakukan tepat waktu.
- c. Penyaluran dana BOS yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, penyaluran dana BOS dilakukan serentak dengan semua sekolah di wilayah tertentu sehingga penyaluran masih harus menunggu kesiapan semua sekolah dalam menerima dana BOS. Hal ini sangat berpengaruh dikarenakan pihak sekolah harus mengelola dana BOS yang sebelumnya dengan sangat baik sehingga mencukupi dengan tanggal penerimaan dana BOS berikutnya.

d. Dana BOS yang diterima dirasa belum mampu mencukupi semua kebutuhan sekolah, penyaluran dana BOS dihitung berdasarkan jumlah seluruh peserta didik dikalikan dengan hasil yang diberikan pemerintah. Pihak sekolah harus mengelola dana BOS dengan lebih efektif sehingga dana BOS yang disalurkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekolah mengaku telah berusaha mengelola dana BOS dengan baik sesuai buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS namun terkadang terjadi hambatan dikarenakan situasi yang sebenarnya itu jauh lebih berbeda dari apa yang tertulis di Undang-Undang, kebutuhan setiap sekolahpun pasti berbeda-beda sehingga sangat sulit untuk sekolah menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan peraturan yang ada terutama dengan dana BOS yang terbatas.

4.3.3 Rekomendasi Kebijakan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat

Ada beberapa rekomendasi kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau dari para Dewan Guru yang berhasil peneliti wawancarai pada tanggal 06 Desember 2021 dan 07 Desember 2021, yaitu sebagai berikut :

1) Ibu Ernawati selaku Ketua Komite, menyatakan :

“Mohon lebih transparan lagi dalam laporan perencanaan dana BOS. Semua dewan guru, komite dan kalau perlu orang tua peserta

didik diikuti sertakan dalam pembuatan laporan tersebut. Biar sama-sama enak, mengawasi proses pengelolaannya juga enak. Jika tidak dilibatkan seperti ini, para dewan gurupun segan untuk bertanya mengenai dana BOS”

2) Nasron, S.Th.M.A selaku Wk. Kurikulum, menyatakan :

“Kedepannya harus terbuka, semua guru harus tau rincian pengelolaan dana BOS dan segala macamnya sehingga dana BOS ini tepat sasaran”

3) Ahmat Yani, S.Pd selaku Wk. Kesiswaan, menyatakan :

“Semoga kedepannya lebih transparan lah mengenai Pengelolaan Dana BOS. Ini demi kenyamanan kita bersama juga”

4) Hendrikus, S.Pd selaku Guru Ekonomi, menyatakan :

“Dana BOS harus lebih transparan. Kapan cairnya, jumlah, dan rencana penggunaan dana BOS itu harus disampaikan melalui rapat terbuka sehingga tidak ada yang ditutupi, tidak ada rasa saling curiga antar sesama”

5) Sri Astuti, S.Pd selaku Guru Bahasa Indonesia, menyatakan :

“Pengelolaan dan BOS ini harus transparan dan akuntabel sehingga dana BOS ini bisa tepat sasaran dan mencapai tujuan yang seharusnya”.

6) Nursiah, S.Pd Selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), menyatakan :

“Diharapkan Pengelolaan dana BOS lebih terbuka lagi kepada para guru, gurukan bukannya tidak penting tapikan peran guru itu mengawasi jalannya pengelolaan dana BOS ini. Jika tidak ada yang mengawasi takutnya pengelolaan dana BOS malah tidak sesuai dengan tujuan diberikannya dana BOS ini oleh pemerintah”.

Rekomendasi Implementasi Kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau diharapkan lebih Transparan dan Akuntabel. Transparan yang dimaksud adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak manajemen BOS sekolah kepada dewan guru, komite dan orang tua peserta didik khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan di manfaatkan sebagai informasi keuangan. Akuntabel dalam manajemen keuangan sekolah berarti penggunaan dana BOS yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, dewan guru, komite dan orang tua peserta didik. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana BOS lebih efektif sehingga tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar serta meningkatkan mutu sekolah.

Adapun perbandingan dari penelitian/jurnal terdahulu yang menjadi acuan dan inspirasi dalam penulisan penelitian ini, yang pertama ada Analisis Pengelolaan Dana BOS di MA Darul Hadits Hutabaringim Kec. Saibu Kab. Mandaling Natal (2017) yang ditulis oleh Muhammad Alisar Lubis. Hasil dari Penelitian ini ialah Pengelolaan Dana BOS di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist sudah relevan karena setiap dana BOS yang disalurkan di Madrasah tersebut, baik berupa sarana maupun prasarana dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan proses belajar mengajar. Dalam hal ini serupa dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Badau yang mana Penggunaan Dana BOS di alokasikan kepada proses belajar mengajar walaupun belum relevan namun pihak sekolah masih berusaha mengelola dana BOS sehingga sesuai dengan tujuannya.

Jurnal kedua yaitu Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MTS Negeri 1 Rabgkit Kab. Banjarnegara (2018) yang ditulis oleh Aziz Nurul Fajrin. Hasil dari penelitian ini ialah Kegunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di MTS Negeri 1 Rangkit Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik, dibuktikan dengan perencanaan yang terorganisir, penggunaan dana BOS yang relevan, dapat memenuhi komponen pembiayaan BOS dan kegiatan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen sekolah. Dalam penelitian yang ditulis oleh Aziz Nurul Fajrin, Pengelolaan dana BOS di MTS Negeri 1 Rangkit sudah transparan yang mana selalu dilakukannya rapat antara pihak

pengelola BOS dan dewan guru sehingga perencanaan pengelolaan dana BOS terorganisir dengan baik. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang peneliti lakukan di SMA Negeri 1 Badau yang mana belum adanya transparansi kepada *stakeholders* sekolah sehingga perencanaan BOS dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan Komite serta Dewan Guru.

Jurnal ketiga yaitu Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabelitas Pengelolaan Dana BOS (studi khusus di SD Negeri Tambakan Bangil) (2019) yang ditulis oleh Nafisatil Maknum. Hasil dari penelitian ini ialah Pengelolaan dana BOS di SDN Tambakan Bangil sudah berjalan cukup baik. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN Tambakan Bangil juga sudah berjalan dengan baik. Keduanya dibuktikan dengan perencanaan penyusunan RKAS yang disusun oleh Tim manajemen BOS yang disahkan kepala sekolah dan komite sekolah serta disosialisasikan kepada wali murid. Penelitian yang dilakukan oleh Nafisatil Maknum tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya yang mana hasil dari penelitian ini pihak sekolah sudah menjalankan prinsip Transparansi dan Akuntabelitas, hal ini tentu berbanding terbalik dengan penelitian yang peneliti lakukan di SMA Negeri 1 Badau, yang mana pihak pengelolaan dana BOS sekolah tidak melibatkan Dewan Guru dan Orang tua peserta didik dalam perencanaan pengelolaan dana BOS sehingga ketidak adanya transparansi membuat keraguan bahwa dana BOS tersebut belum tepat sasaran.

Transparansi mengenai perencanaan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau harus diterapkan mengingat banyaknya keluhan datang dari para peserta didik mengenai fasilitas yang tidak terpelihara dan kurangnya perhatian sekolah terhadap kebutuhan siswa dan dewan guru.

Menurut William N Dunn (2000) Analisis Kebijakan Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan atau setelah suatu kebijakan diimplementasikan, demikian merupakan hasil dan transformasi sesudah kebijakan diambil disebut juga dengan model evaluatif.

Tiga gaya dalam analisis retrospektif, yaitu :

- a) *Discipline-Oriented* yaitu kajian murni berdasarkan disiplin ilmu.
- b) *Problem-Oriented* yaitu kajian sebab dan konsekuensi kebijakan terhadap masalah kebijakan.
- c) *Application-Oriented* yaitu kajian implemntasi kebijakan sampai pada sejauh mana outcome an manfaat kebijakan (*concern* terhadap pencapaian tujuan dan obyektif dari *policy makers* dan *stokeholders*).

Berikut merupakan pemetaan situasi masalah yang terjadi di SMA Negeri 1 Badau dengan menggunakan format Analisis Kebijakan Retrospektif.

Tabel : 4.3

Pemetaan situasi masalah dengan format

Analisis Kebijakan Retrospektif

SITUASI MASALAH	META MASALAH	MASALAH SUBSTANTIF	MASALAH FORMAL	PENYELESAIAN MASALAH
-----------------	--------------	--------------------	----------------	----------------------

<p>Belum adanya perubahan yang signifikan dari SMAN 1 Badau. Seperti perubahan fisik atau sarana dan prasarana yang didanai oleh BOS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya transparansi mengenai pelaporan perencanaan pengelolaan dana BOS kepada stakeholders sekolah - Pihak manajemen BOS sekolah kurang memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan dalam proses belajar mengajar. - Tidak meminta saran atau pendapat kepada dewan guru dan komite dalam mengelola dana BOS 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya transparansi mengenai pelaporan perencanaan pengelolaan dana BOS kepada stakeholders sekolah - Pihak manajemen BOS sekolah kurang memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan dalam proses belajar mengajar. 	<p>Kurangnya transparansi mengenai pelaporan perencanaan pengelolaan dana BOS kepada stakeholders sekolah menjadikan pengelolaan dana BOS tidak efektif sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan sarana dan prasarana serta proses belajar mengajar di sekolah.</p>	<p>Perlu adanya perbaikan atas implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau, yang mana meliputi sosialisasi mendalam mengenai pengelolaan dana BOS serta penggunaannya kepada seluruh stakeholders sekolah. Dibuatkannya kotak kritik dan saran sehingga dewan guru, komite, dan orang tua peserta didik dapat menyampaikan aspirasi kepada pihak manajemen BOS mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta perlu adanya pengawasan langsung oleh dewan guru, komite dan orang tua peserta didik atas jalannya perencanaan pengelolaan dana BOS sehingga lebih transparan dan terarah sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama.</p>
---	---	--	---	---

(Sumber : Diolah Penulis, 2022)

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Kebijakan Retrospektif Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, maka kesimpulan dari penelitian ini ialah pengimplementasian kebijakan pengelolaan dan BOS di SMA Negeri 1 Badau belum sepenuhnya efektif meskipun sudah berpedoman kepada Petunjuk Teknis Penggunaan BOS, karena :

- 1) Masih terdapat saran dan prasaranan yang tidak didanai oleh BOS dan di bebankan kepada peserta didik serta masih kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga menghambat perkembangan peserta didik dalam proses belajar.
- 2) Mekanisme penyaluran dana BOS masih menggunakan cara manual sehingga memakan proses yang lama.
- 3) Kurang adanya transparansi dalam perencanaan, penyusunan dan pelaporan mengenai dana BOS kepada *stakeholders* sekolah sehingga jalannya pengelolaan dana BOS tidak dalam pengawasan.

Diatas merupakan kendala yang menjadikan kurang efektifnya pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau. Adapun faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS, yaitu sebagai berikut :

1) Faktor Pendukung

- a. Komunikasi yang baik antara Tim BOS sekolah sehingga pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Badau berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

2) Faktor Penghambat

- a. Kurangnya SDM dalam mengelola dana BOS.
- b. Letak Geografis Sekolah yang jauh dari Perkotaan.
- c. Penyaluran dana BOS yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
- d. Dana BOS yang diterima dirasa belum mampu mencukupi semua kebutuhan sekolah.

Sekolah mengaku telah berusaha mengelola dana BOS dengan baik sesuai Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS namun terkadang terjadi hambatan dikarenakan situasi yang sebenarnya itu jauh lebih berbeda dari apa yang tertulis pada Undang-Undang, sehingga sangat sulit untuk sekolah menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan peraturan yang ada terutama dengan dana BOS yang terbatas.

Komunikasi antara Kepala Sekolah, Tim BOS, Komite dan Dewan Guru menjadi sangat penting karena masalah seperti ini bisa terpecahkan dengan mencari solusi bersama-sama. Oleh karena itu banyak rekomendasi implementasi kebijakan BOS kedepannya ialah menerapkan prinsip Transparansi dan Akuntabel yang mana tujuan dari rekomendasi ini ialah menjadikan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau lebih tepat sasaran sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Penggunaan BOS.

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Pengimplementasian Kebijakan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau sudah berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS namun belum efektif. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu :

- 1) Sekolah seharusnya mengadakan sosialisasi kepada dewan guru, Komite sekolah serta orang tua peserta didik mengenai perencanaan/penggunaan dana BOS guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Dengan adanya dukungan dan perhatian dari para *stakeholders* sekolah, program BOS ini dapat berjalan secara optimal, transparansi dan akuntabel.

- 2) Diharapkan pihak sekolah lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah sehingga proses belajar mengajar di SMA Negeri1 Badau berjalan lebih efektif dan efisien.
- 3) Diharapkan pihak sekolah segera menggunakan Aplikasi Dapodik sehingga mekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah menjadi lebih mudah dan cepat serta dapat diawasi langsung oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gava Media.
- Anwar, Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat. Jakarta
- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press
- Burhan, Bungil. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Hal. 6. Jakarta: Kencana
- Chairunnisa, Connie. 2017. *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi dalam Pendidikan dan Sosial*. Hal. 177. Jakarta: mitra Wacana
- Duun, W. N. 1999. *Analisis Kebijakan*. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, Ma Dkk. Jakarta
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fattah, Nanang. 2014. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Hal. 177. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moleong, j. Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Minarti, Sri. 2016. *Manajemen Sekolah: Mengelola lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Hal. 209. Jogjakarta: Ar-Ruzz Merdia
- Sagala, Syaiful. 2016. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2009. *Metode penelitian Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Hal. 308. Bandung Alfabeta

B. Peraturan Undang-Undang

Kemendiknas. 2014. *Petunjuk Teknis Penggunaan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015*. Jakarta : Dekdikbud

Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020.

Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang *Standar Biaya Operasional Non Personalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB.*

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional.*

Pasal 34 ayat 2 : Wajib Belajar.

C. Internet

Dye, dan Lasswell, dan Lester. 2015. *Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, dalam Eddy (2004) : <https://www.kumpulanpengertian.com>*, diakses 14 Desember 2021

Data statistik. 2006. *Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat : <https://kec-badau.kapuashulukab.go.id>*, diakses 09 Desember 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. *Logo Aplikasi Dapodik (versi 2022) : <https://www.dapo.kemdikbud.go.id>*, diakses 21 Februari 2022

Oktifa, Nita. 2021. *Aplikasi Dapodik (versi 2022) : <https://akupintar.id>*, diakses 21 Februari 2022

Selfanus, Stevan, A. 2021. *Faktor Penyebab pemerintah tidak transparan* :
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/18/142912769/faktor-penyebab-pemerintah-tidak-transparan>, diakses 21 Februari 2022